



LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN**

**Jalan H. Boejasin No 9 Pelaihari
Telp (0512) 21098**

KATA PENGANTAR

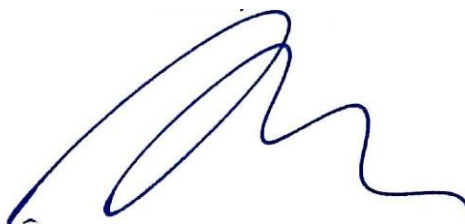
Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2019-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari,

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



Hj. Nina Sandra, SKM., MM

NIP. 19640710 198511 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implimentasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri 5 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Pelayanan Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Sedangkan Esselon IV sejumlah 15 Jabatan (3 Kepala Sub Baigan dan 12 Kepala Seksi).

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan visi dan misi Bupati

Tanah laut dimana Dinas kesehatan berkewajiban dalam misi I yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2021 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2021, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	90 %	87%	97 %
		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	90 %	96%	107%
		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	95 %	101 %%	106%
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	92 %	100 %%	109%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	45 %	49,78%	111%
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100 %	60%	60%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	69,2 %	69,67 %	101%
		2. Persentase TTU yang memenuhi	80 %	67,85 %	85%

		syarat Kesehatan			
		3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70 %	50,9 %	73%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100 %	100 %	100%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100 %	81,7 %	82%
		2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100 %	100 %	100%
		3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 %	70 %	70%
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	47 %	77 %	163%
		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100 %	100 %	100%
		3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100 %	100 %	100%
		4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	30 %	0 %	0%
		5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga	48 %	100 %	208%

		(Asman TOGA) di Desa.			
		6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100 %	98,96 %	99%
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	70 %	78%	112%
		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	95 %	90,5%	96%
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	90 %	90 %	100%
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100 %	95%	95%
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100 %	100%	100 %
		2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100 %	100%	100 %
		3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100 %	100%	100 %
		4. Persentase	100 %	100%	100 %

		Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar			
		5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100 %	100%	100 %
		6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	72	81,57	113 %

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dari Anggaran Rp. 447.018.832.047 terealisasi sebesar Rp. 373.375.993.262,21 (83,5%), anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp 83.699.259.604,- terealisasi 110.497.711.103,96 (132,02%)

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan;
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal;
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk terus memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Mendukung dan mensukseskan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Pasca Bencana dan Pemenuhan Target-Target Indikator RPJMD khususnya Bidang Kesehatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	5
C. Isu Strategis	23
D. Produk dan Layanan	24
E. Sistematisasi Penyajian	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
A. Visi RPJMD	28
B. Misi RPJMD	28
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	29
D. Indikator Kinerja Utama	33
E. Perjanjian Kinerja	35
F. Program dan Kegiatan	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	43
1. Sasaran RPJMD	47
2. Eselon II (Kepala Dinas Kesehatan)	60
3. Eselon III (Sekretaris) A	78
a. Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1	81
b. Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2	86
c. Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan) A.3 ..	90
4. Eselon III (Kepala Bidang) B	96
a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	96
1). Eselon IV (Kepala Seksi Promosi Kesehatan) B.1	102
2). Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga) B.2	108
3). Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat) B.3	115
b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.....	125
1). Eselon IV (Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan	

Kesehatan) B.4	128
2). Eselon IV (Kepala Seksi Farmasin dan Alkes) B.5.....	145
3). Eselon IV (Kepala Seksi SDM) B.6	150
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	154
1). Eselon IV (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi) B.7	157
2). Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) B.8	171
3). Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa) B.9	175
d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	182
1). Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional) B.10.....	187
2). Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan) B.11	194
3). Eselon IV (Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) B.12	199
B. Akuntabilitas Keuangan	202
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021	202
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	203
3. Realisasi Persentase Keuangan Kinerja & Efisiensi sasaran Strategis	205
4. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2021	206
5. Rekap Realisasi Anggaran Penanganan Covid 19 sumber APBD dan APBN tahun 2021	215
C. Monitoring dan Evaluasi.....	216
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	217
B. Strategi Peningkatan Kinerja	219
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. IKU	
2. Pernyataan Hasil Reviu	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
4. Cascading (Pohon Kinerja)	
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (I - IV)	
6. Monev Renstra	
7. Matrik Keselarasan 2021	
8. SK. Tim Penyusun LKj SKPD Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	19
Tabel 1.2	20
Tabel 1.3	21
Tabel 1.4	21
Tabel 2.1	22
Tabel 2.2	34
Tabel 2.3	36
Tabel 3.1	44
Tabel 3.2	48
Tabel 3.3	50
Tabel 3.4	60
Tabel 3.5	60
Tabel 3.6	61
Tabel 3.7	62
Tabel 3.8	65
Tabel 3.9	69
Tabel 3.10	71
Tabel 3.11	75
Tabel 3.12	78
Tabel 3.13	81
Tabel 3.14	85
Tabel 3.15	86
Tabel 3.16	89
Tabel 3.17	90
Tabel 3.18	93
Tabel 3.19	96
Tabel 3.20	102
Tabel 3.21	108
Tabel 3.22	115
Tabel 3.23	125
Tabel 3.24	128
Tabel 3.25	145
Tabel 3.26	150
Tabel 3.27	154

Tabel 3.28	157
Tabel 3.29	171
Tabel 3.30	175
Tabel 3.31	182
Tabel 3.32	187
Tabel 3.33	194
Tabel 3.34	199
Tabel 3.35	202
Tabel 3.36	204
Tabel 3.37	205
Tabel 3.38	206
Tabel 3.39	214
Tabel 3.40	214
Tabel 3.41	215

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1	49
Grafik 3.2	50
Grafik 3.3	63
Grafik 3.4	67
Grafik 3.5	68
Grafik 3.6	70
Grafik 3.7	76
Grafik 3.8	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2021 Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

LAPKIN Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut “**Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TEtata, Religius, AKtual, SInergi)**” melalui pelaksanaan program/kegiatan pada Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan yaitu Pelayanan kesehatan selain tetap fokus pada

pelayanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas maupun posyandu juga kedepan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang ada di Pelaihari. Peningkatan kualitas ini guna merespon perkembangan jenis penyakit degeneratif utama maupun konsekwensi dari adanya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menghasilkan tenaga penyedia tenaga madya kesehatan yang dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit. Sejalan dengan itu untuk menyeimbangkan kemajuan IPTEKS di bidang kesehatan, maka pembangunan pendidikan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pendidikan kesehatan.

Arah dari pembangunan gizi adalah berupaya untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang. Pembangunan gizi juga diarahkan untuk mewujudkan keasadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh serta peningkatan pengetahuan akan gizi.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang, Selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan kesadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh, serta peningkatan pengetahuan tentang gizi, meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan optimalisasi peran puskesmas; puskesmas pembantu dan posyandu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, dan meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar yang prima. Dimana rumah sakit di Pelaihari sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten Tanah Laut dapat memastikan arah penajaman kualitas dan fokus pelayanan yang akan diberikannya dan ditunjang dengan penyediaan tenaga dokter spesialis dan peralatan yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan.

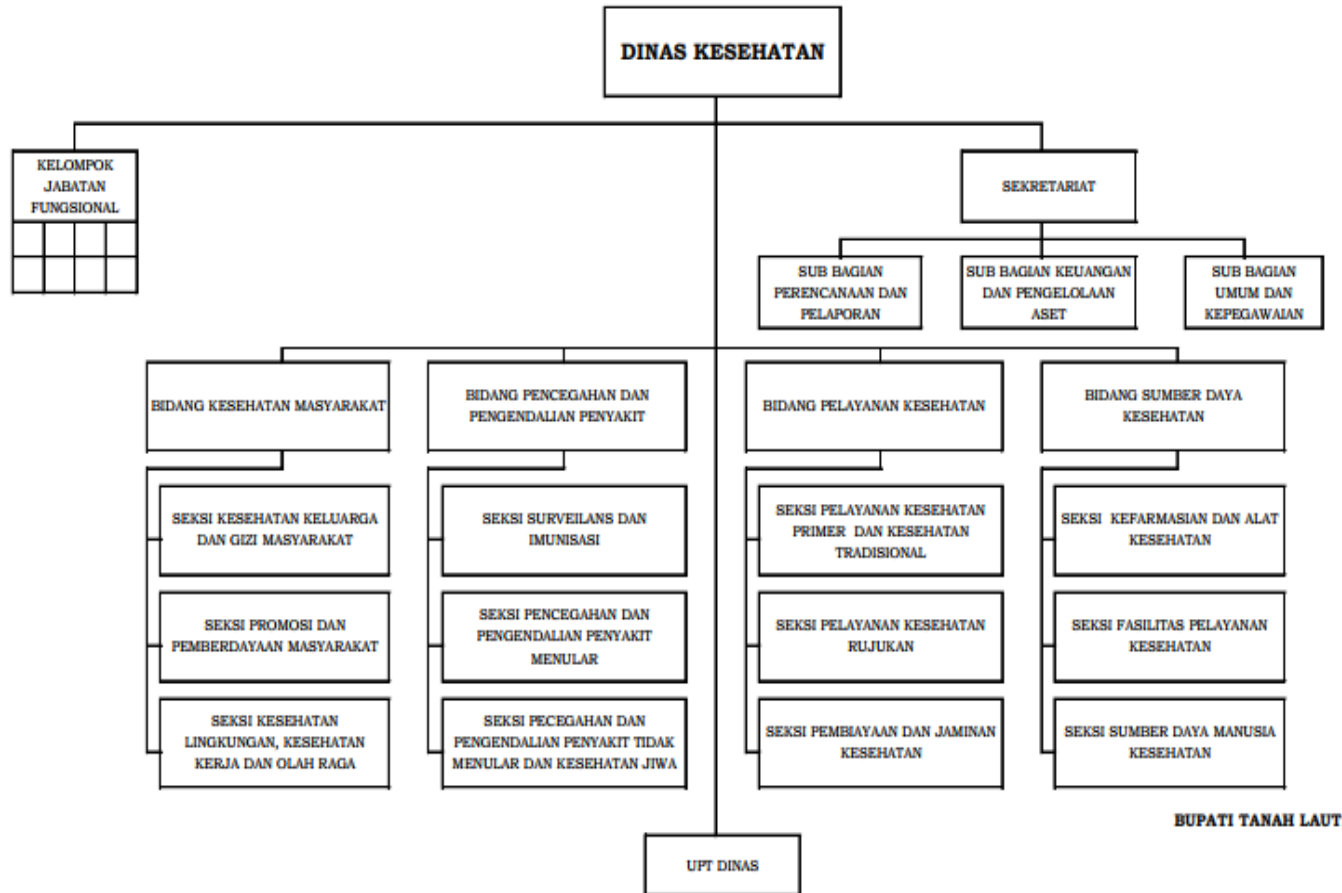
B. Struktur Organisasi Tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Kesehatan merupakan unsur pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Kesehatan dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 67 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Desember 2016



BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 2) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi :

Kepala Dinas

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
 - d. pelaksanaan administrasi dinas
 - e. pembinaan UPT Dinas dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan
 - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah

- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang.
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dan
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

- Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang kesehatan Masyarakat
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi dari:

- 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
- 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi dari:

- 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Surveilans Dan Imunisasi

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait surveilans dan imunisasi.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi dari:

- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
- 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan rujukan.

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi dari:

- 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitas pelayanan kesehatan..

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya kesehatan.

UPT Dinas

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- 4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.

- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka, pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- 6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- 7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

Kepegawaian

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

Jabatan

- 1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- 2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- 4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 58 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 58 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 4 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 15 orang dan, staf pelaksana sebanyak 37 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kepala Seksi				15		15
5	Staf PNS/Pelaksana					37	37
	JUMLAH						58

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 52 orang, diikuti golongan II

sebanyak 11 orang, golongan IV sebanyak 7 orang serta ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang. Selain pegawai berstatus PNS dan Pegawai PTT.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang		2	2					4
4	Kepala Seksi		1	12	2				15
5	Staf		1	8	20	8			37
	JUMLAH								58

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 6 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang 3 orang, Kepala Seksi 1 orang dan Staf 1 orang. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 22 orang dan SLTA sebanyak 8 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

- a. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2021

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	9	9		17
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	3	9			9
4	Bidang P2P	1	10			10
5	Bidang Kesehatan Masyarakat	2	8	1		10
6	Bidang Sumber Daya Kesehatan		7	1		9
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	32	182	25	2	243
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	21	11		35
9	UPT Labkes		4	3		7
10	UPT IFK	2	8	1		9
11	UPT Puskesmas Pelaihari	5	49	7		62
12	UPT Puskesmas Angsau	4	25	5		37
13	UPT Puskesmas S. Riam		16	5		20
14	UPT Puskesmas Panyipatan		14	8		22
15	UPT Puskesmas Batakan		8	4		12
16	UPT Puskesmas Takisung		24	4		28
17	UPT Puskesmas Jorong	1	19	4		28
18	UPT Puskesmas Asam-Asam	3	17	5		22
19	UPT Puskesmas Kintap	1	20	3		21
20	UPT Puskesmas Sei Cuka		13	2		16
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		34	11		42

22	UPT Puskesmas T. Ulang	2	22	8		32
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	3	36	6		45
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	16	4		21
25	UPT Puskesmas Kurau		19	8		24
26	UPT Puskesmas Padang Luas		15	4		20
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	26	2		31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		11	7		20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	1	15	8		22

- b. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel .1.4

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT
menurut tingkat pendidikan tahun 2021

No	Unit Kerja	Golongan						Jmlh
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat		5	5	7			17
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan		7	4				9
4.	Bidang P2PL	1	5	5				10
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	5	6				10
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan		4	2	1			9
7	UPT. RSUD H. Boedjasin		93					
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap		14	19				35
9	UPT Labkes		1	5	1			7
10	UPT IFK		5	3	1			8
11	UPT Puskesmas Pelaihari	2	16	29	4			62
12	UPT Puskesmas Angsau		9	20	5			37
13	UPT Puskesmas S. Riam		5	14	2			20
14	UPT Puskesmas Panyipatan		4	16	3			22
15	UPT Puskesmas Batakan		7	5	1			12

16	UPT Puskesmas Takisung		9	18	3			28
17	UPT Puskesmas Jorong	1	3	21	2			28
18	UPT Puskesmas Asam-Asam		7	16	2			22
19	UPT Puskesmas Kintap	3	4	14	3			21
20	UPT Puskesmas Sei Cuka	1	3	11	2			16
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah	1	9	30	4			42
22	UPT Puskesmas T. Ulang		8	21	5			32
23	UPT Puskesmas Bati-Bati		16	23	6			45
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	5	13	2			21
25	UPT Puskesmas Kurau		7	14	5			24
26	UPT Puskesmas Padang Luas		4	12	2			20
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya		9	14	7			31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		3	13	2			20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	2	5	16				22

C. Isu Strategis

1. Terdapat 4 (empat) isu strategis dalam pembangunan kesehatan di tahun 2021 yaitu

- Penurunan angka stunting;
- Penurunan kematian ibu dan bayi;
- Perbaikan pengelolaan sistem JKN;
- Penguatan pelayanan kesehatan serta obat dan alat kesehatan.

2. Kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) s.d Desember 2021

Pada tahun 2021 jumlah kasus COVID-19 yang positif sebanyak 6.620 orang, yang sembuh sebanyak 6.433 orang dan meninggal 187 orang.

Untuk pencapaian target vaksinasi covid 19 sampai dengan 31 Desember 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona Virus Disease 2019, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan Juknis-Juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga Kesehatan, Masyarakat Umum, Lansia, Petugas Publik, Ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 269.965 sasaran.

D. Produk dan Layanan

Dengan adanya perkembangan dan dinamisasi serta globalisasi yang terjadi dengan sangat cepat di masyarakat mengakibatkan munculnya suatu pola baru dan kecenderungan yang meningkat pula pada kebutuhan dan tuntutan atas pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Pemberian pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di puskesmas saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat bukan saja dari sesama instansi kesehatan tetapi juga dari para praktisi dan para profesional yang bergerak di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh semakin banyaknya bermunculan ide, gagasan, dan terobosan baru dalam dunia usaha pelayanan kesehatan untuk merespons tuntutan dan kebutuhan pasar dalam mencari bentuk produk pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat bersaing bukan hanya dari sisi harga tetapi juga benefit yang diberikan.

Adapun Produk dan Layanan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Dasar:

Pelayanan kesehatan dasar yang juga disebut basic health services terdiri dari beberapa jenis pelayanan kesehatan yang dianggap esensial (sangat penting) untuk menjaga kesehatan seseorang, keluarga dan masyarakat agar hidup produktif secara

sosial dan ekonomi. Terdapat dua ketentuan yang menetapkan jenis-jenis pelayanan dasar, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 43/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Peraturan Menteri Kesehatan 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jenis-jenis pelayanan kesehatan dasar tersebut memerlukan pelayanan promotif, preventif, skrining, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif dan holistik baik kepada kelompok masyarakat maupun individu, Pelayanan kesehatan Dasar dilakukan di 19 Puskesmas tersebar di 11 Kecamatan, adapun jenis pelayanan kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Promosi Kesehatan
 - b. Kesehatan Lingkungan
 - c. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit
 - d. Kesehatan Keluarga dan reproduksi
 - e. Perbaikan Gizi Masyarakat
 - f. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspesialisistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daraeh H. Boedjasin.

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialisistik)
- b. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialisistik)

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2021 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
 - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1). Eselon IV (Kasubbag /Kasubbid) A.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
 - 4. Eselon III (Kepala Bidang) B

1). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1

2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2

B.Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2021

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. IKU

2. Pernyataan Hasil Reviu

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

4. Cascading (Pohon Kinerja)

5. Capaian Kinerja Per Triwulan (I - IV)

6. Monev Renstra

7. Matrik Keselarasan 2021

8. SK. Tim Penyusun LKj SKPD Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Kesehatan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;

5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai misi Dinas Kesehatan adalah :

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati tahun 2021

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)						
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	13	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	90%
		AKB per 1000 kelahiran hidup	9,6		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	90%
		Prevalensi	22%		3. Persentase Bayi	95%

yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya		stunting			Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	
					4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	92%
				Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	45%
					2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%
				Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,	1. Persentase desa STBM	69,2%
					2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%
					3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%
				Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%
					2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%

					3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Indeks kepuasan masyarakat	84,4	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	47%
		2. Indeks Keluarga Sehat	0,8		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%
					3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%
					4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	30%
					5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	48%
					6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%
				Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	65%
					2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	89%
					3. Persentase obat dan BMHP yang	87%

					sesuai Formularium Nasional	
					1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%
				Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%
					2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%
					3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%
					4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%
					5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%
					6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	72

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah , tujuan, indikator tujuan,sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2018-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan pada lampiran.

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Kesehatan berjumlah 5 indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan

IKU Dinas Kesehatan merupakan Tujuan yang paling utama dari semua program dan kegiatan bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan Indikator sebagai berikut:
 - a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.
 - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
 - c. Prevalensi Stunting
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Keluarga Sehat
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3	Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di EPPGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS > 0,800 dibagi dengan jumlah keluarga seluruhnya	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
		2	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata tertimbang perunsur pelajaran dikali dengan 25	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan

dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 1 (satu) yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting, dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggungjawab Bidang Kesehatan Masyarakat serta Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 2 (dua) yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan meliputi pengukuran Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatannya berupa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, pelayanan kegawatdaruratan oleh public service center (PSC), peningkatan status fasilitas kesehatan menjadi BLUD, upaya menjadikan desa dengan Indikator Keluarga Sehat (IKS) kategori sehat, pembinaan kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di desa, jaminan kesehatan kepada penduduk miskin, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional perkantoran sesuai standar dan aturan, penanggungjawab Bagian Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

E. Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2021 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Renstra maupun Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang telah disepakati baik oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV terdapat pada lampiran.

Perjanjian kinerja tahun 2021 telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2021 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

F. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2021, melaksanakan 5 program, 24 kegiatan dan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215,812,315,427
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,944,600
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,540,600
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,999,000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,540,000

1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,860,000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,860,000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36,145,000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,768,755,981
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99,657,695,021
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	111,060,960
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	497,807,430
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	340,935,430
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78,400,000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,312,000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28,160,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,258,598,537
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194,313,060
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,576,665,640
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	682,825,337
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	898,177,890
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	974,886,730
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,475,880
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	921,254,000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,160,858,153
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,307,900,000
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159,999,928
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	336,681,421
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,317,650,224
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38,626,580
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,393,658,897
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,250,000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,686,463,840
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,707,850
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,630,237,207

1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,135,019,273
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52,560,300
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,648,973,160
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	47,988,180
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,450,000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358,645,320
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,020,402,313
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,000,000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	81,519,672,556
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	81,519,672,556
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	178,655,350,953
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	78,781,544,250
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,265,690,000
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	14,065,090,091
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,530,868,002
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7,973,964,974
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,291,410,259
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29,191,355,158
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	293,625,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	7,473,101,070
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3,920,786,206
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	95,933,000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	487,622,240
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	192,098,250
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,634,310,563
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,097,693,785

1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,631,962,704
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	254,297,500
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	485,960,754
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	354,894,720
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	450,136,700
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	378,354,500
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	221,058,200
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118,188,200
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	83,960,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	179,035,000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	84,560,000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5,560,938,280
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	28,050,000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,514,959,600
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	93,580,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	875,759,230
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,746,310,800
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	55,755,000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5,237,836,000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	99,927,000
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6,939,351,790
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,182,910,400
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64,049,092,200
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	22,985,000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38,450,200
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3,038,037,290
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243,694,930
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1,762,774,180
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	326,074,000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	477,722,600
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	351,934,880

1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	236,072,100
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	115,862,780
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	887,561,260
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,929,000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	700,542,260
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	162,090,000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	48,935,270,983
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	48,495,643,383
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16,120,000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48,278,748,383
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200,775,000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	439,627,600
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	439,627,600
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	90,414,500
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,638,000
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,638,000
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20,000,000
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20,000,000
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8,495,000
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	8,495,000

	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24,777,500
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24,777,500
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9,034,000
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9,034,000
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	7,470,000
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7,470,000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3,525,480,184
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188,075,900
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	188,075,900
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,167,271,484
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3,167,271,484
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170,132,800
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	170,132,800
TOTAL PAGU		447.018.832.047

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga Renstra 2019-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pencapaian sasaran strategis memuat tentang nilai pencapaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- Rentang nilai 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- Rentang nilai 70 s/d <85 : Berhasil
- Rentang nilai 55 s/d <70 : Cukup Berhasil
- Nilai < 55 : Tidak Berhasil

Rumus perhitungan untuk mendapatkan angka diatas adalah jumlah keseluruhan capaian dibagi jumlah item/indikator capaian dikali seratus persen.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan harus terus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), prevalensi gizi stunting, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan meningkatkan indeks keluarga sehat.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2020 dan 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2020			2021			2023
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	85%	80%	94%	90%	87%	97%	100%
	2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	85%	90%	106%	90%	96%	107%	100%
	3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	92%	96%	104%	95%	101%	106%	100%
	4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	90%	77%	86%	92%	100%	109%	100%
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	45%	113%	45%	49,78%	111%	60%
	2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	27%	27%	100%	60%	60%	100%

Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,	1. Persentase desa STBM	53,8%	71%	132%	69,2%	69,67%	101%	100%
	2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	61%	76%	80%	67,85%	85%	80%
	3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	81%	116%	70%	50,9%	73%	70%
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%	82%	100%
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	57%	57%	100%	81,7%	100%	100%
	2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%
	3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	80%	80%	100%	70%	70%	100%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	37%	0%	0%	47%	77%	163%	68%
	2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	19%	100%	525%	100%	100%	100%	100%

	4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	25%	0%	0%	30%	0%	0%	50%
	5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	44%	52%	117%	48%	100%	208%	56%
	6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	100%	100%	100%	98,96%	99%	100%
Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	65%	100%	154%	70%	78%	112%	80%
	2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	89%	100%	112%	95%	90,5%	96%	100%
	3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	87%	100%	115%	90%	90%	100%	100%
	1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	60%	60%	100%	95%	95%	100%
Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	71	71	100%	72	81,57	113%	74
Rata-Rata Capaian			106%				99,4%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 8 Sasaran Strategis dan 29 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 rata-rata telah tercapai seluruhnya dengan rata-rata capaian 106% dan terdapat 7 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, dan pada tahun 2021 ada 9 indikator yang realisasinya melebihi dari target namun rata-rata capaian menurun menjadi 99,4%.

Untuk menggambarkan analisa pencapaian per sasaran strategis pada pada tabel yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2019-2023.

1. Sasaran RPJMD

Dalam mencapai sasaran Strategis RPJMD Dinas Kesehatan merupakan Instansi yang memangku Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang dapat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

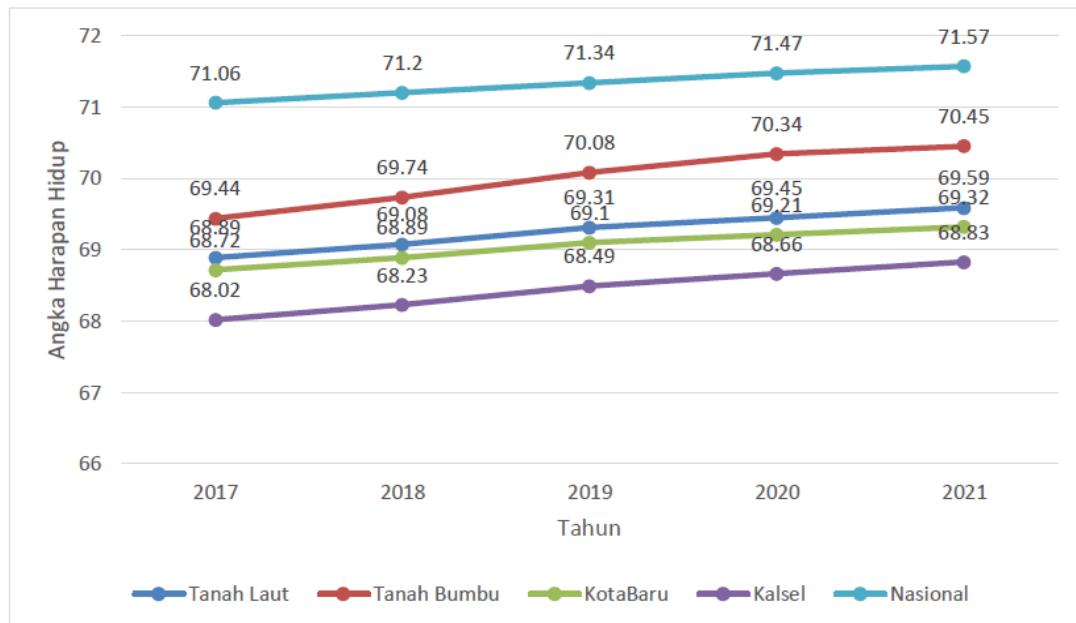
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

No	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISAI	% CAPAIAN
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,31	69,45	69,30	69,59	100,41%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100,41%

Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata peluang untuk hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indikator tersebut. Umur Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam menghitung umur harapan hidup yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup dilakukan proses normalisasi berdasarkan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

Realisasi indikator Angka Harapan Hidup tahun 2021 adalah 69,59 tahun, realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,30 tahun dengan tingkat capaian 100,41%. mengalami peningkatan 0,14 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 69,45 tahun. Realisasi tersebut sudah mencapai 99,7% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 69,80 tahun.

Grafik 3.1
Angka harapan hidup Kab/Kota di Kalimantan Selatan dan Nasional



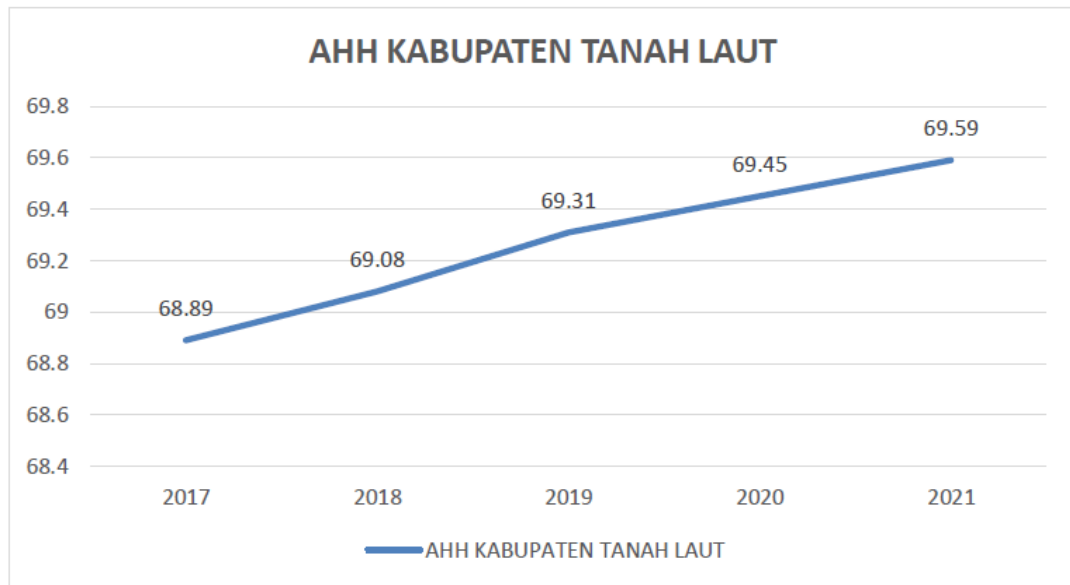
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 untuk angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dengan angka 69,59 tahun lebih tinggi dari Kabupaten Kotabaru namun berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 70,45 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, lebih tinggi 0,62 tahun dengan angka 68,83 tahun dan lebih rendah 1,98 tahun jika di bandingkan dengan angka harapan hidup Indonesia dengan angka 71,57 tahun.

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

Trend peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.2
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2017 -2021



Sumber: BPS Kabupaten tanah Laut

Pada tahun 2020, angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut sebesar 69,45 sementara pada tahun 2021 angka tersebut meningkat menjadi 69,59. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 diharapkan mencapai umur 69,59 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat.

Angka Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, umur harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya daerah yang Angka Harapan Hidupnya tinggi pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi yang menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakatnya yang diukur dengan indikator sesuai dengan indikator sesuai tabel dibawah.

Tabel 3.3
Data kematian ibu dan bayi serta prevelensi gizi stunting
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	46,2	122,8	267

2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	7,4	9,5	11,3
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	15,66%	10,67%	6,41%

Dari data ini dapat digambarkan AKI dan AKB mengalami peningkatan di tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 267 dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 11,3 akan tetapi Prevalensi Gizi Stunting mengalami penurunan 6,41 %. Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 berjumlah 8 orang dan di tahun 2021 meningkat menjadi 17 orang, kemudian Angka Kematian Bayi tahun 2020 berjumlah 73 orang dan di tahun 2021 menurun menjadi 72 orang.

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian pada usia di bawah satu tahun. Menurut BPS (2016) secara teori menurunnya angka kematian bayi dapat meningkatkan angka harapan hidup di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan bayi sangat rentan terhadap penyakit dan pengaruh dari lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik.

Meskipun demikian banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup, berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama / Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari beberapa faktor (Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, ahli gizi Institut Pertanian Bogor) yaitu:

- 1) Pola makan
- 2) Penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif
- 3) Lingkungan tempat tinggal
- 4) Stress/tekanan

Faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan umur harapan hidup terdiri atas:

- 1) Gizi
- 2) Merokok
- 3) Manepause
- 4) Osteoporosis/tulang keropos

Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah 83,69 (Mutu Pelayanan Baik), oleh karenanya meskipun AKI dan AKB

Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan akan tetapi Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 69 tahun, 31 hari (tahun 2019) menjadi 69 tahun, 45 hari (tahun 2020) meningkat 14 hari, hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Tanah Laut.

Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai melebihi target dikarenakan:

- 1) Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bisa diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 diperoleh pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,69 dimana dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada kisaran Baik.
- 2) Pelayanan Kesehatan juga bisa diukur dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 capaian AKI adalah 267 per 100.000 Kelahiran Hidup lebih tinggi dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup dan target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 11,3 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 16 per 1000 Kelahiran Hidup dan SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih.
- 3) Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sampai tahun 2021 ini dapat dikatakan telah memadai. seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan polindes. saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki 2 buah rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari dan Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap. Selain itu kita juga mendapat dukungan dari beberapa rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Borneo Citra Medika, Rumah Sakit Khusus RSIA Ibunda dan RSIA Ainun, Klinik Utama Ammariz, Klinik-Klinik Perusahaan serta beberapa Klinik Pratama lainnya yang kesemuanya berada di wilayah kabupaten Tanah Laut.

4) Layanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Tanah Laut tersebar merata di seluruh kecamatan sebanyak 19 buah, dengan 2 buah adalah puskesmas rawat inap yaitu puskesmas tajau pecah dan kurau. sampai tahun 2021 ini hasil penilaian akreditasi puskesmas adalah:

- 7 puskesmas mendapat predikat utama, meliputi puskesmas kurau, asam-asam, sungai cuka, pelaihari, bati-bati, tambang ulang dan sungai riam.
- 11 puskesmas mendapat predikat madya, yakni puskesmas padang luas, bumi makmur, kintap, jorong, tajau pecah, tanjung habulu, tirta jaya, batakan, panyipatan, kait-kait, dan angsau.
- 1 puskesmas mendapat predikat dasar yakni puskesmas Takisung
- sementara, 2 puskesmas baru yang dibangun dan dioperasikan pada Desember 2021 proses akreditasinya akan dilaksanakan pada tahun 2022/2023.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala atau diakreditasi ulang 3 (tiga) tahun sekali. Dari pelaksanaan akreditasi perdana maka pada tahun 2019/2020 seharusnya telah dilakukan re akreditasi pada 5 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2017, pada tahun 2021 ini seharusnya dilakukan reakreditasi pada 6 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2018, namun karena kondisi pandemi covid-19 kegiatan ini menjadi tertunda, sehingga pada tahun 2021 ada sebanyak 11 Puskesmas yang rencana akan diakreditasi ulang. Selajutnya pada tahun 2022 akan dilaksanakan re akreditasi pada 8 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2019. Untuk itu perlu kita persiapkan pelaksanaan akreditasi ulang (Re Akreditasi) untuk Puskesmas-Puskesmas dan kembali dikuatkan komitmen re akreditasinya.

- Puskesmas yang telah mendapatkan predikat dasar, madya dan utama direncanakan akan dire-akreditasi dan diharapkan akan meningkat menjadi puskesmas predikat utama dan paripurna.
- 5) Peningkatan manajemen puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada semua puskesmas, 19 puskesmas yang telah di BLUD kan pada tahun 2019, 2 Puskesmas di Tahun 2022.
 - 6) Penempatan Bidan Desa di semua desa dan kelurahan (130 desa dan 5 Kelurahan) yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, disamping itu juga Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terutama yang berisiko tinggi dengan mendatangkan dokter spesialis kebidanan secara berkala di Puskesmas yang ditunjuk. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.
 - 7) Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit, Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dan Vaksinasi di tahun 2021 hal ini dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat diutamakan, di masa Pandemi COVID-19 saat ini fokus utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2021 jumlah kasus COVID-19 yang positif sebanyak 6.620 orang, yang sembuh sebanyak 6.433 orang dan meninggal 187 orang.
- Untuk pencapaian target vaksinasi covid 19 sampai dengan 31 Desember 2021.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan

pandemic corona Virus Disease 2019, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan Juknis-Juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga Kesehatan, Masyarakat Umum, Lansia, Petugas Publik, Ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 269.965 sasaran.

- 8) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 11 Kecamatan yaitu 2 (dua) Rumah sakit Umum Daerah, 19 (sembilan belas) Puskesmas, 1 (satu) Instalasi Gudang Farmasi, 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah, 61 (enam puluh satu) Puskesmas Pembantu, 124 (seratus dua puluh empat) Poskesdes/Polindes, 19 (sembilan belas) Ambulan, 19 (sembilan belas) Puskesmas Keliling, dan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Posyandu dan pada akhir Tahun anggaran 2021 telah berdiri 2 Puskesmas yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati Tanah Laut H. Sukamta yaitu Puskesmas Bentok Kampung dan Puskesmas Durian Bungkok berikut untuk menunjang operasional puskesmas tersebut telah disiapkan juga 2 (dua) unit Mobil Ambulan.
- 9) Memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdiri dari ;
 - Dokter Spesialis sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 28 orang dokter spesialis di RSUD H. Boejasin Pelaihari dan 3 orang Dokter Spesialis di RSUD K.H Mansyur Kintap.
 - Dokter Umum sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang terdiri dari 20 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 10 orang di RSUD K.H Masyur Kintap, 8 Orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 2 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing - masing.
 - Dokter Gigi sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, terdiri dari 3 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap,

1 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing – masing.

- Dokter Gigi Spesialis sebanyak 1 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari.
- Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 22 orang terdiri dari 2 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 orang di RSUD. K.H. Mansyur Kintap sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
- Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 43 orang yang terdiri dari 7 Orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 1 orang di RSUD.K.H. Mansyur Kintap, 1 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT puskesmas masing masing.
- Tenaga Nutrisi sebanyak 70 orang terdiri dari 20 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 5 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 2 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
- Perawat sebanyak 539 orang terdiri dari 241 di RSUD H. Boejasin pelaihari, 36 orang di KH Mansyur Kintap, 64 orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 6 Orang di RSIA ibunda dan sisanya tersebar di Puskesmas masing – masing.
- Bidan sebanyak 511 orang terdiri dari 94 di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 24 Orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 95 orang di RSBCM pelaihari, 10 Orang di RSIA Aiunun, 21 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.
- Tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 75 orang terdiri dari 25 Orang di RSUD H. Boejasin pelaihari, 6 orang di RSUD K.H Mansyur Kintap, 7 Orang, di RSBCM pelaihari, 2 orang di RSIA Ibunda.
- Tenaga Teknik Bio Medika lainnya sebanyak 57 Orang terdiri dari 39 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 7 Orang di KH. Masyur Kintap, 9 orang di RSBCM pelaihari, 2 orang di RSIA Ibunda.
- Tenaga Keterampilan Fisik sebanyak 21 orang terdiri dari 6 Orang di RSUD. H. Boejasin Pelaihari, 15 org di RSBCM Pelaihari.
- Tenaga Keteknisian Medis sebanyak 32 orang terdiri dari 17 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 3 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 6

Orang di RSBCM Pelaihari, 6 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas Masing Masing.

- 10) Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah namun sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2021 adalah 49,78% (dari 8.044 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 3.956 rumah tangga yang ber PHBS) capaian ini belum mencapai target renstra pada tahun 2021 (60%) tetapi angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2020 (45,0%) dari capaian PHBS tahun 2021 diketahui masih ada 50,22% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat salah satu indikator yang membuat capaian PHBS tidak tercapai adalah masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah yaitu sebesar 51,3%. Untuk memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. 5 pilar STBM yaitu:
- Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS),
 - Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air mengalir (CTPS),
 - Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM RT),
 - Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,
 - Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

- 11) Secara kumulatif desa yang sudah melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) desa atau mencapai 170% dari target 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) desa, dan sudah melebihi target renstra Dinas kesehatan di tahun 2021 (69,02%). Akan tetapi untuk pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2021 masih 11 % desa (15 Desa dari 130 Desa dan 1 Kelurahan dari 5 Kelurahan) yang sudah di nyatakan desa ODF (Open Defecation Free) artinya Desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan yang mana dinyatakan melalui deklarasi desa ODF melalui verifikasi sebelumnya.
- 12) Pelaksanaan Layanan *On Call PSC 119*. Bermula dengan adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 Pemda Tanah Laut memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membentuk Layanan Publik (PSC 119), Serta adanya Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, akhirnya Terbentuklah **Layanan Public Safety Center 119**. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional **12 November 2019** yang dilaksanakan di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang diresmikan Langsung Bapak Bupati Sukamta, Dewan DPRD Tanah Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Layanan *On Call* atau Layanan *Public Safety Center*. Layanan on Call merupakan salah satu program unggulan Bupati tanah Laut yang beralamat pada jalan hutan kota (komplek perkantoran Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut).

Hambatan:

- 1) Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara ekonomi dan sosial, serta sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan dalam upaya mencapai kesetaraan dan mewujudkan hidup makmur. Pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, diharapkan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap, memilih, beradaptasi atau mengembangkan segala bentuk informasi dan pengetahuan baru untuk kehidupannya.

- 2) Faktor ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat akan menunjukkan kemampuan seseorang terhadap daya beli maupun menunjukkan pendapatan dari masing-masing personal dengan didapatkannya alat pembayaran. Hampir semua yang ada di dunia memerlukan alat pembayaran untuk memperolehnya, baik sandang, pangan, ataupun papan. Angka harapan hidup itu sendiri yang menjadi ukuran kesehatan dan keberhasilan dalam indeks pembangunan manusia pasti memerlukan berbagai macam biaya untuk mencapainya. Oleh karena itu, faktor perekonomian suatu individu atau daerah menjadi penting. Perekonomian daerah erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten atau kota
- 3) Faktor pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Jika pendapatan per kapita (PDRB) meningkat maka akan mengurangi angka kematian bayi dan angka harapan hidup akan meningkat.
- 4) Kurangnya respon masyarakat terhadap akses kesehatan

Solusi

- 1) Memperluas akses kesehatan masyarakat melalui program *Universal Health Coverage (UHC)* atau hak jaminan kesehatan cakupan semesta yang dimaksudkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial melalui program jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (JKN-KIS) dijamin pada layanan kesehatan kelas III.
- 2) Lebih meningkatkan upaya-upaya yang sudah baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan berbagai bidang lain.
- 3) Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang pentingnya angka harapan hidup itu sendiri dikarenakan tidak banyak yang tahu terkait pentingnya angka harapan hidup, terutama kalangan dengan pendidikan yang relatif rendah.
- 4) meningkatkan Umur harapan Hidup tidak hanya bidang kesehatan, dan sangat diperlukan kerjasama di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Sosial, Ekonomi dan lain lain.

- 5) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 3.4
Terkait Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan Kabupaten/ Kota Tahun 2021

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persentasi
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)		
	PBI APBN	99.495	28,57
	PBI APBD	122.480	35,17
	Sub Jumlah PBI	221.975	63,74
2	NON PBI		
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	75.237	21,61
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	41.460	11,91
	Bukan Pekerjaan	3.883	1,12
	Sub Jumlah NON PBI	120.580	34,63
	Jumlah (Kab / Kota)	342.555	98,37

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 231.206.516.620 dan terealisasi Rp. 186.702.102.907 atau sebesar 80,75%.

Tabel 3.5
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.925.400.983	39.081.121.820
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178.655.350.953	147.594.648.587
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90.414.500	26.332.500
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.535.350.184	3.208.762.559
Jumlah		231.206.516.620	186.702.102.907

2. Eselon II (Kepala Dinas Kesehatan)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU)

sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan pada tahun 2021 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% pencapaian
A. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat :			
1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	13	267	5
2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	9,6	3,6	267
3. Prevalensi stunting	22	6,4	343
B. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan			
1. Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,17	21
2. Indeks kepuasan Masyarakat	84,4	83,69	99

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2021, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator sasaran ber kriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Angka Kematian Bayi dan Penurunan Prevalensi Gizi Stunting, sedangkan 3 (tiga) lainnya tidak tercapai yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Keluarga Sehat.

Tujuan/sasaran strategis indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan merupakan komponen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2021 yaitu :

a. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan di Kabupaten Tanah Laut telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain dilihat dari beberapa indikator, seperti angka kematian bayi, Prevalensi Gizi Stunting terus

mengalami perbaikan. Untuk Penurunan kematian ibu perlu mendapat perhatian dan upaya yang lebih intensif.

Secara keseluruhan untuk peningkatan Status Kesehatan Masyarakat ini berhasil, Keberhasilan ini banyak dipengaruhi oleh pengembangan layanan kesehatan di sektor publik. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan yang terus membaik. Akses layanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas fasilitas layanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan jaringannya. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu terus ditingkatkan melalui pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan peserta PBI Jamkesda dan PBI APBD/JKN-KIS.

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Capaian	% Capaian	
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	15	123	13	267	5%	10
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	10	11	9.6	3,6	267%	9,2
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	24	10,67	22	6,4	343%	20%

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi gizi stunting.

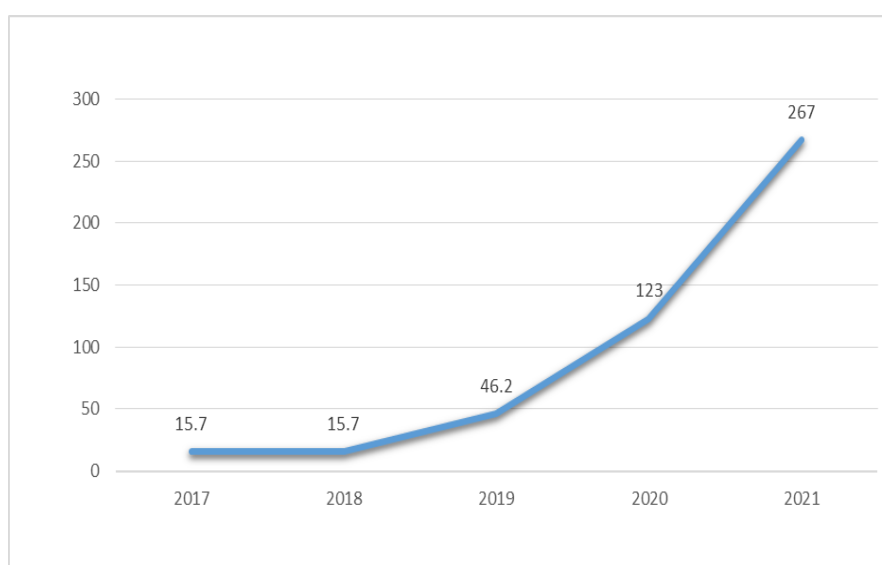
1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 267 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan

rumus AKI yaitu $\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$, yang mana pada tahun 2021 ini ada 17 kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.367 orang, sehingga ditemukan hasil AKI yaitu 267 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut tidak mampu mencapai target renstra di tahun 2021 sebesar 13 per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian AKI ini di hitung nilai realisasi kinerja sebesar 5 % dalam kategori tidak berhasil. Kondisi inipun masih berada jauh dari target Nasional AKI yaitu sebesar 183 per 100.000 kelahiran. Selanjutnya kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir di gambarkan dalam gambar berikut.

Grafik. 3.3

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017-2021



Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun 2017 dan 2018 tetap, dan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 kematian ibu mengalami peningkatan kasus. Pada tahun 2019 meningkat, jumlah kematian ibu mencapai 3 (tiga orang) dan di tahun 2020 bertambah 8 (delapan) kematian, kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 17 (tujuh belas) kematian Ibu dengan AKI 267 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini lebih tinggi dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 11 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 16 per 1000 Kelahiran Hidup dan

SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan oleh Perdarahan 5 (lima) orang, Hypertensi dalam kehamilan 1 (satu) orang, Infeksi 1 (satu) orang, COVID-19 6 (enam) orang, dan sebab lain-lain 4 (empat) orang. Sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

Kondisi saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah semakin baik terlihat dari data PWS persalinan dengan tenaga kesehatan rerata diatas 90 % di masing-masing wilayah kerja puskesmas sehingga keterlambatan karena pengambilan keputusan semakin kecil. Yang perlu mendapat perlakuan khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawatan untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan SDM Kesehatan : Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi.
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan : Audit Maternal Perinatal, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA dan KB.
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan resiko tinggi.
- Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program

- Pemantapan sistem rujukan terutama sistem rujukan ibu hamil dan bersalin
- Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
- Promosi kesehatan dan pemberdayaan .
- Pengoptimalan Peran dan tupoksi Bidan desa.
- Peningkatan pelayanan Ibu Hamil dimasa Pandemi Covid-19

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang akan dilakukan dalam penurunan kematian ibu adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Rencana Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

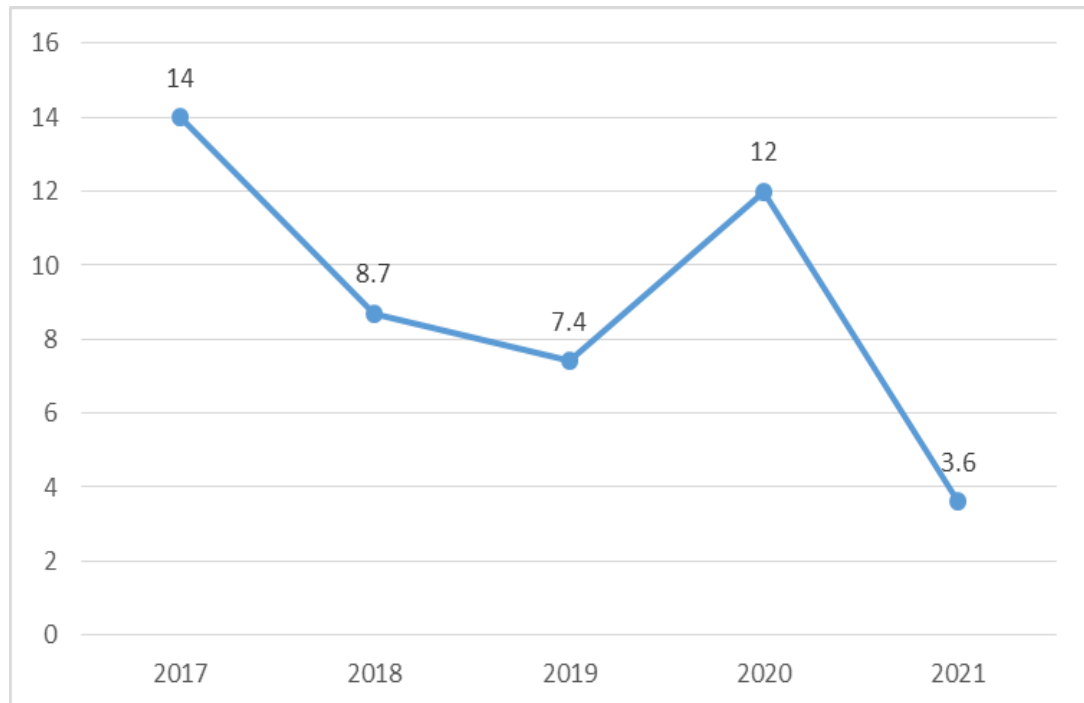
No	FAKTOR	ANALISA PENYEBAB	INTERVENSI
1	Fasilitas pelayanan kesehatan	Kualitas pelayanan KIA yang masih perlu ditingkatkan	Kebijakan Pemeriksaan bumil gratis bagi yang mempunyai KTP Tanah Laut
			Implementasi ANC Terpadu
			Tata laksana dan Rujukan
			Audit Maternal Perinatal
			Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas secara berkala
2	Petugas	Kompetensi petugas yang masih beragam	Peningkatan kapasitas petugas
		Pemantauan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan oleh petugas belum optimal	Jejaring antar fasilitas kesehatan untuk pemantauan ibu
			Penguatan peran bidan desa
			Monev pelaksanaan

			PISPK
3	Faktor Ibu	Pengetahuan Ibu tentang tanda bahaya kehamilan kurang	Kunjungan rumah ibu hamil dan neonatus risiko tinggi
			Konsultasi dokter ahli melalui kunjungan dokter spesialis kandungan ke Puskesmas secara berkala
			Peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
		Perbaikan gizi pada ibu hamil KEK dan atau anemia	Intervensi Gizi pada bumil KEK, bumil anemia
4	Pemberdayaan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi ibu hamil belum optimal	Peningkatan pelayanan ambulan desa
			Kelas ibu hamil melibatkan keluarga ibu hamil
			Deteksi faktor risiko ibu hamil oleh masyarakat

2) Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2021 jumlah absolut kematian bayi sebesar 72 kematian bayi dari 6.367 kelahiran hidup. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 11,3 per 1000 kelahiran hidup (72 kematian) masih diatas target sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup (59 kematian), terjadi penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Penghitungan nilai realisasi kinerja capaian AKB tahun 2021 sebesar 267% termasuk kategori Sangat Berhasil. Kecendrungan pencapaian AKB pada lima tahun terakhir 2017-2021 di sajikan dalam gambar berikut :

Grafik : 3.4
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2017 – 2021

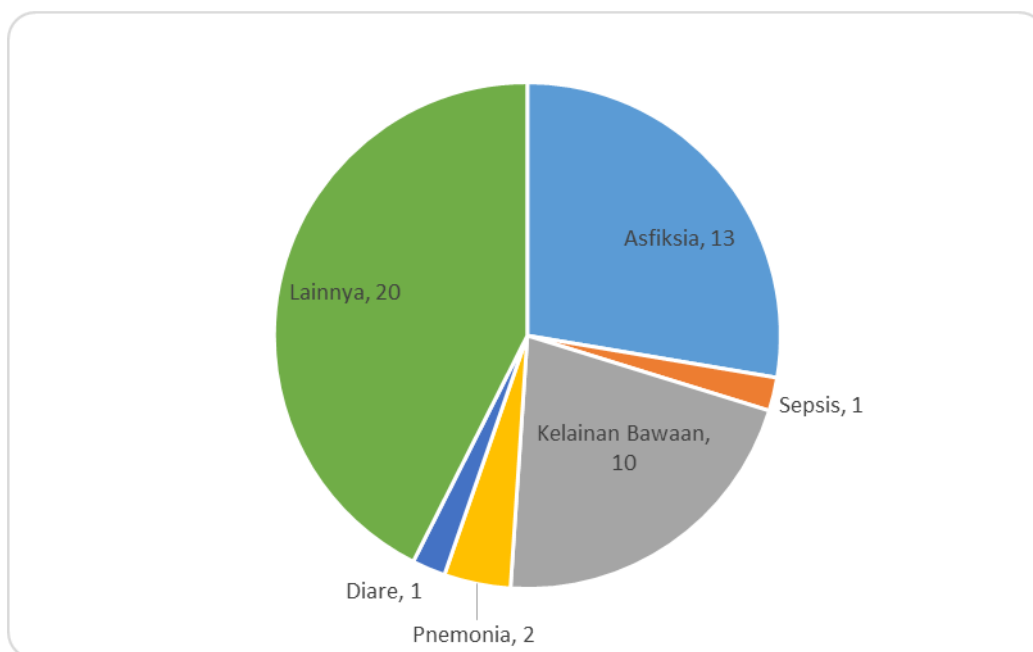


Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Peningkatan angka kematian terjadi pada semester akhir sebagai dampak dari Pandemi COVID-19.

Penyebab kematian bayi adalah BBLR 25 (dua puluh lima) orang, asfiksia 13 (tiga belas) orang, sepsis 1 (satu) orang, kelainan bawaan 10 (sepuluh) orang, pneumonia 2 (dua) orang, diare 1 (satu) orang, dan penyebab lain 20 (dua puluh) orang.

Hasil audit penyebab kematian bayi secara absolut disajikan pada grafik berikut :

Grafik : 3.5
Penyebab Kematian Neonatal



Dari gambar di atas terlihat paling banyak penyebab kematian bayi adalah penyebab lainnya, ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penanganan gizi sejak bayi dalam kandungan, perlu penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan gizi ibu hamil.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian bayi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
- program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
- peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

Tabel 3.9

Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Bayi dan Rencana
Intervensi di Kabupaten Tanah Laut

No	FAKTOR/KENDALA	ANALISA PENYEBAB/KENDALA	TINDAK LANJUT/INTERVENSI
1	Penyakit pada bayi	BBLR	Kunjungan rumah, deteksi dini Bumil berisiko tinggi
			Pemberian makanan Tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Protein
			Penyuluhan perorangan tentang peningkatan gizi ibu hamil
		Asfiksia	Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatus
		Kelainan	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia
2	Faktor Ibu	Peningkatan jumlah ibu hamil KEK dan anemia	PMT ibu hamil KEK dan atau anemia
			Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu remaja
		Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif	Pendampingan ibu oleh kader dalam pola asuh bayi balita
			Kelas ibu hamil
3	Petugas	Kapasitas petugas dalam skreening bayi berisiko	Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)
			Workshop SOP penanganan BBLR
			Audit Maternal Perinatal bayi
			Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi berisiko
			Monev pelaksanaan PISPK
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alur rujukan belum sistematis	Implementasi Manual rujukan
		Masih ada sarana dan prasarana	Peningkatan sarana prasarana puskesmas

		Puskesmas tidak sesuai standar	
--	--	--------------------------------	--

3) Prevalensi Stunting

Pada tahun 2021 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 6,41% dari target <21 % yaitu sebanyak 2026 orang Balita gizi stunting dari 31619 Balita yang terentry di EPPGBM. Sebaran prevalensi stunting yang terbanyak adalah di wilayah kerja Puskesmas Padang Luas sebesar 17,90 %, dari data ini Dinas Kesehatan dapat menentukan lokus untuk penanganan gizi stunting. untuk sebaran prevalensi gizi stunting bisa dilihat pada Grafik berikut:

Grafik : 3.6

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021



Capaian ini juga sudah melampaui target Kalimantan selatan yaitu dibawah 28%, banyaknya kasus gizi stunting disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga. Pencapaian angka prevalensi gizi stunting ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil (diatas nilai100 %).

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna terus menurunkan Prevalensi stunting Balita pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan kader.
- b) implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
- c) surveilans gizi, dan pemberian intervensi
- d) konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli
- e) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK.
- f) Operasi Timbang

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi atau tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penurunan Prevalensi Stunting sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut :

Tabel : 3.10
Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Prevalensi
Gizi Stunting dan Rencana Intervensi
di Kabupaten Tanah Laut

N O	FAKTOR RESIKO	ANALISA PENYEBAB	RENCANA INTERVENSI
1	Balita	Penyakit kongenital	Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia
			Pemberian asam folat saat kehamilan
		Infeksi TB Balita, ISPA, dan Diare	Pelacakan dan pengobatan kasus TB
			Kampanye ASI eksklusif
			Promosi PHBS
			Penyuluhan kesehatan lingkungan
			Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen penyakit balita (MTBS)
		Asupan gizi	Pemberian PMT balita gizi

			buruk dan dan balita kurus
			Pelatihan kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak (Kader PMBA
2	Petugas	Keberlanjutan peningkatan kompetensi petugas	Workshop permasalahan gizi
			Bimtek petugas gizi
			Monev Fasilitator PMBA
			Audit kasus Gizi Buruk
			Monev pelaksanaan PISPK

b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar terhadap publik merupakan amanah yang harus terus dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang -undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut adalah adalah pelayanan di bidang kesehatan.

Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan sangat penting karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat. Kesehatan juga merupakan aspek yang sangat vital dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana terdapat 4 Goals (Gizi Masyarakat, Sistem Kesehatan Nasional, Akses Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB) serta Sanitasi dan Air Bersih), 19 target dan 31 Indikator dalam sektor kesehatan pada SDGs 2015-2030, hal ini dikarenakan kesehatan merupakan indikator perkembangan suatu bangsa. Memperoleh kesehatan merupakan hak setiap individu atau kelompok. Dalam UUD

1945 Pasal 28 H ayat 1, secara eksplisit dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga.

Dinas Kesehatan telah melaksanakan beberapa program pelayanan kesehatan untuk menciptakan kondisi kesehatan masyarakat agar menjadi lebih baik. Program-program tersebut antara lain berupa subsidi pembiayaan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia di sektor kesehatan, peningkatan sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan manajemen kesehatan. Tujuan program-program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian apakah selama ini peningkatan kualitas benar-benar dirasakan oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Keluarga Sehat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indeks Keluarga Sehat adalah merupakan proporsi keluarga sehat / jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarnya berkisar antara 0-1. yang diukur berdasarkan 12 indikator Keluarga Sehat yaitu :

- Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0 – 11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).

- Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak
- Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).
- Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.
- Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
- Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
- Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.

- Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
- Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Tabel. 3.11

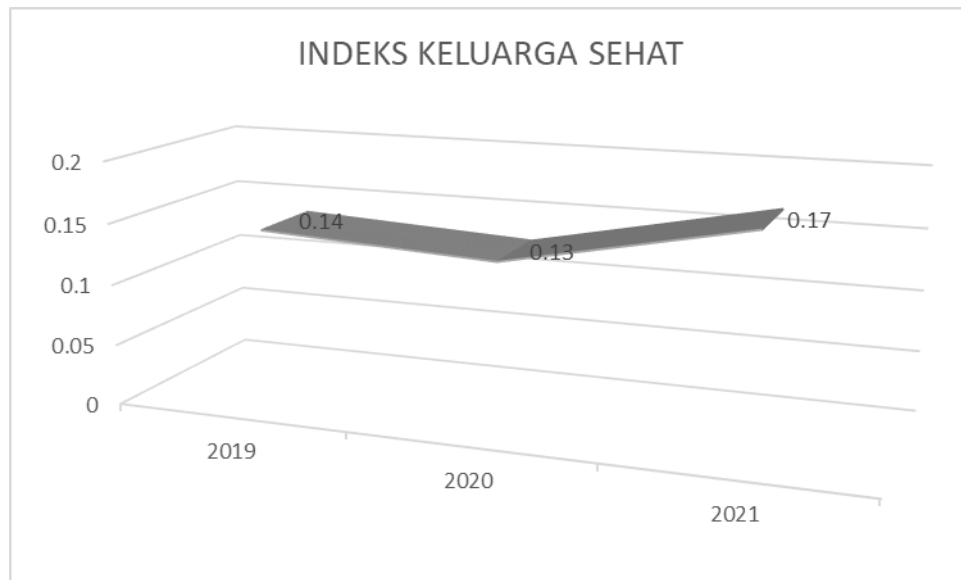
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2023)
				Target	Capaian	% Capaian	
1	Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,13	0,8	0,17	21	0,8
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	83,53	84,4	83,69	99	100

1) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tanah laut tahun 2021 adalah 0,17 berarti masih perlu menjadi perhatian dan kerja keras dari Dinas Kesehatan untuk mencapai target yaitu 0,8. Untuk pencapaian indikator ini hanya 21% atau termasuk katagori tidak berhasil, namun dari tabel di atas IKS Kabupaten Tanah laut menunjukan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 3.7
Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 – 2021



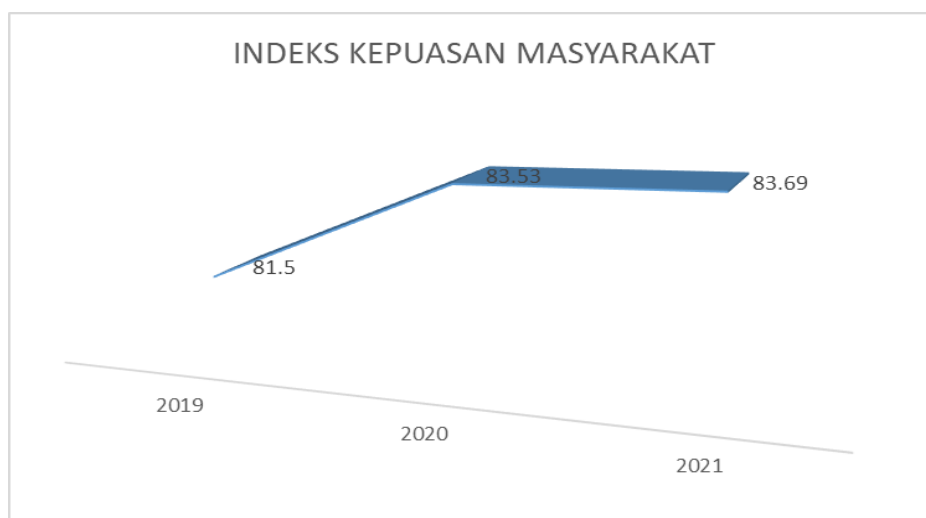
dari 12 indikator keluarga sehat yang paling sulit dicapai adalah Anggota keluarga tidak ada yang merokok, dimana untuk menghilangkan kebiasaan merokok ini dinas kesehatan sudah berusaha melakukan Kampanye anti rokok, melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok, penerbitan Perda Rokok.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 mencapai 83,69 masih berada di bawah target yaitu 84,4 atau capaiannya hanya 99% atau dikatagorikan berhasil, dan dari pengukuran IKM selama 4 tahun ada kecendrungan IKM Kabupaten Tanah Laut sedikit menurun di tahun 2021.

Grafik 3.8

Indeks kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah laut tahun 2019 -2021



Usaha atau akselerasi Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan Indeks kepuasan masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai.
- Pembangunan baru Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Poskesdes)
- Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Penyediaan Fasilitas Pendukung Pelayanan kesehatan.
- Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Kunjungan Petugas kesehatan ke rumah melalui program PIS-PK termasuk kunjungan ke rumah pada kasus kegawat daruratan (on call).
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada mas bencana baik bencana alam maupun non-alam (masa pandemi Covid-19).

3. Eselon III (Sekretaris) A

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 8

Sasaran strategis Nomor 8 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.12
Tabel Sasaran Strategis 8

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2020			2021			2023
Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	89%	89%	100%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	71	71	100%	72	81.57	113%	74
Rata-Rata Capaian				100%			100%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran capaian kinerjanya rata-rata tahun 2021 **100 % dengan kategori sangat berhasil.**

1. Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran dengan baik dan sesuai aturan dimana dari target 5 jenis pelayanan administrasi yang diberikan seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan dengan nilai realisasi 100%, adapun sumber daya manusia yang ada dalam mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengadministrasi umum dan 3 orang PTT dengan jabatan Tenaga Administrasi.
2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar dimana dari jumlah target sarana dan prasarana sebanyak 28 jenis dan yang dapat direalisasikan sebanyak 25 sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 89%. Hal ini dapat terlihat adanya penurunan realisasi disbanding tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Adapun jumlah sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag umum dan kepegawaian dan 3 orang PTT dengan jabatan Tenaga Administrasi, 4 orang PTT tenaga kebersihan dan 2 orang tenaga jaga malam.
3. Pesentase Pelayanan kepegawaian sesuai standar dimana dari jumlah pegawai sebanyak 896 orang seluruhnya mendapatkan pelayanan kepegawaian sesuai standar dengan nilai realisasi 100%. Hal ini telah mencapai target renstra di tahun 2023. Adapun jumlah sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang

kasubbag umum dan kepegawaian, 1 orang pengelola kepegawaian, 1 orang pengadministrasi kepegawaian dan 1 orang Pengemudi.

4. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dari jumlah laporan sebanyak 1 laporan dan telah diselesaikan sesuai standar sehingga realisasi 100% baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021. Hal ini berarti realisasi di tahun 2021 sudah mencapai target yang diinginkan untuk target jangka menengah tahun 2023 yaitu 100%. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag keuangan dan pengelolaan aset, 1 orang analis keuangan, 1 orang bendahara, 1 orang pengelola keuangan dan 2 orang pengadministrasi keuangan dan 3 orang PTT tenaga administrasi.
5. Persentase pencatatan aset sesuai standar telah mencapai target yaitu 100% dimana dari target 1 laporan aset dalam 1 tahun telah dilaksanakan. Hal ini telah mencapai target renstra tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun untuk sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag keuangan dan pengelolaan aset, 1 orang pengadministrasi keuangan, 2 orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan 1 orang PTT tenaga administrasi.
6. Nilai laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 yaitu 81,57 dari target 72 ini berarti nilai LAKIP sudah mencapai angka lebih dari 100%. Dan merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana nilai SAKIP Dinas Kesehatan sudah mencapai Nilai A yang berarti Baik. Untuk sumber daya manusia yang mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang kasubbag perencanaan dan Pelaporan, 1 orang pengelola bahan perencanaan dan 3 orang PTT tenaga administrasi. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan SAKIP Tahun Anggaran 2021 yaitu:
 - Adanya beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target.
 - Kurang terintegrasinya data program
 - Ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang

Adapun hal-hal yang akan dilakukan dalam meningkatkan sasaran Indikator yang masih belum tercapai yaitu:

1. Peningkatan SDM baik dibagian Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Aset serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.
2. Melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja di bagian ke sekretariat secara berkala.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Sumber Daya Manusia yang ada yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut dengan dibantu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, serta Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021, yang akan dijelaskan per sub bagian/eselon sebagai berikut:

o **Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A.1**

Tabel. 3.13

Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	1 Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	5	5	100
		2 Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar	28	25	89
		3 Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	7	6	86
2.	Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian	1 Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kepegawaian sesuai SOP	896	896	100
Rata-Rata Capaian					93,7

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	394.967.760	0	0
			Pengadaan Mebel	121.232.100	112.600.000	93
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.016.270	12.683.000	40
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	598.216.380	467.902.814	78
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.601.690	87.537.860	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	251.365.873	102.005.700	41
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.479.880	2.400.000	37
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.790.000	296.097.986	86
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	28.160.000	8.446.010	30

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.312.000	2.137.500	4
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.990.330	60.770.215	78
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.751.362.648	1.233.990.386	70
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.674.400	111.038.223	82
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.175.840	315.729.992	97
		Jumlah			4.204.345.171	2.813.339.686

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 ini dilaksanakan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 93,7 % dengan kategori sangat berhasil.

- a. Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP capaian 100%

Pencapaian kinerja indikator ini dilihat dari rata-rata pencapaian fisik kegiatan tahun 2021 tersebut mencapai 100%, sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi

Perkantoran sesuai SOP dan berjalan lancar sebagaimana mestinya.

- b. Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar capaian 89%

Pencapaian kinerja indikator sarana dan prasarana perkantoran dilihat dari rata2 pencapaian fisik kegiatan tahun 2021 tersebut mencapai 89%, hal ini dikarenakan belanja barang dan jasa yang tidak optimal terkendala spek seperti belanja meja kerja serta adanya efesiensi belanja barang seperti alat kebersihan, alat tulis kantor, computer, PC , printer dan lain lain.

Saran perbaikan : menginventarisasi sarana dan prasarana perkantoran secara terinci ditahun 2022.

Rencana Aksi/tindak lanjut : Hal-hal yang sudah dilakukan membuat inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran yang diperlukan di kantor Dinas Kesehatan.

- c. Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara capaian 86%

Pencapaian kinerja indikator ini dilihat dari rata2 pencapaian fisik kegiatan tahun 2021 tersebut mencapai 86%, hal ini dikarenakan penginventarisasian peralatan dan perlengkapan kantor yang mengalami kerusakan belum maksimal dan terinci serta banyaknya mobil yang mulai terawat dengan baik, sehingga tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan.

Saran perbaikan : menginventarisasi peralatan dan perlengkapan perkantoran secara terinci ditahun 2022.

Rencana Aksi/tindak lanjut : Hal-hal yang sudah dilakukan membuat inventarisasi peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memerlukan pemeliharaan per bidang.

- d. Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kepegawaian sesuai SOP capaian 100%

Pencapaian kinerja indikator ini dilihat dari rata2 pencapaian fisik kegiatan tahun 2021 tersebut mencapai 100%, sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai yang mendapat pelayanan

kepegawaian sesuai SOP dan berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada pada sub bagian umum dan kepegawaian yaitu ada sebanyak 18 orang dengan jumlah PNS sebanyak 5 orang dan PTT sebanyak 13 orang dengan jabatan 4 orang tenaga kebersihan, 7 orang tenaga administrasi dan 2 orang tenaga jaga malam. Untuk jumlah PNS di bagian subbag umum dan kepegawaian masih tidak memenuhi kelas jabatan yang ada sesuai pada table di bawah ini:

Tabel 3.14
Analisa Jabatan PNS di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Jabatan	Yang ada	Kebutuhan	-/+
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
2	Analisis Tata Laksana	0	1	-1
3	Pengelola Kepegawaian	1	3	-2
4	Pengelola Teknologi Informasi	0	1	-1
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	2	-1
6	Pengadministrasi Umum	1	2	-1
7	Pengemudi	1	2	-1

Foto-foto Kegiatan :



penyediaan Rapat koordinasi Dalam/luar daerah (12 Bulan)



pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (28 Jenis)



pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi kendaraan operasional, peralatan gedung kantor (7 Jenis)



pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian (896 Berkas)

○ **Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset) A.2**

Tabel. 3.15

Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Dukungan Keuangan dan Pencatatan Aset	1 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SOP	1	1	100
		2 Jumlah pelaporan aset yang disusun sesuai SOP	1	1	100
Rata-Rata Capaian					100

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99,657,695,021	81,933,533,908	82
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	99,993,600	55,354,000	55
Jumlah				99,757,688,621	81,988,887,908	82

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 juga dilaksanakan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan dan Aset yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 100% dengan kategori sangat berhasil.

- a) Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SOP dengan capaian 100%

Kendala: Dinas Kesehatan membawahi 23 UPT yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga untuk pembuatan laporan Dinas Kesehatan harus menunggu pelaporan 23 UPT tersebut.

Saran perbaikan : mengingatkan secara resmi melalui surat tertulis kepada Puskesmas untuk tertib nya sistem pelaporan, agar UPT di bawah Dinas Kesehatan dapat lebih tertib dan tepat waktu dalam pembuatan laporan.

Rencana Aksi/ Tindak lanjut Rapat koordinasi secara rutin dengan bendahara Puskesmas untuk membahas hal hal yang dianggap perlu untuk kelancaran proses pelaporan dan keuangan.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Rapat koordinasi dengan Bendahara di UPT dan pembuatan grup whatsapp untuk percepatan informasi antara Dinas Kesehatan dan UPT nya. Menghimbau puskesmas untuk mengumpulkan laporan tepat waktu melalui group bendahara Puskesmas, memberikan penjelasan secara rinci terkait pembuatan laporan, menghimbau untuk lebih teliti dalam penyusunan laporan dan melakukan peng entrian SPJ tepat waktu.

Ketersediaan SDM di sub bagian keuangan dan aset terdiri dari Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2 (dua) orang, Analis Keuangan 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan 1 (satu) orang, Pengadministrasian Keuangan 3 (tiga) orang, dan Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja

(ABK) perlu penambahan 2 (dua) org verifikator minimal lulusan D3 mengingat beban kerja verifikator di subbag keuangan yang cukup besar dan belum didukung ketenagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Jumlah pelaporan aset yang disusun sesuai SOP dengan capaian 100%

Kendala terkait pencapaian indikator kinerja pada sub bagian keuangan dan aset adalah beberapa Puskesmas terlambat untuk mengumpulkan berkas pelaporan seperti yang diminta Dinas Kesehatan. Beberapa Puskesmas terkadang masih ada yang kurang tepat dalam menyusun laporan sehingga perlu dikembalikan untuk diperbaiki, sehingga memperlambat selesainya laporan Dinas Kesehatan secara keseluruhan .

Saran perbaikan : mengingatkan secara resmi melalui surat tertulis kepada Puskesmas untuk tertib nya sistem pelaporan. UPT di bawah Dinas Kesehatan dapat lebih tertib dan tepat waktu dalam pembuatan laporan

Rencana Aksi/ Tindak lanjut : Rapat koordinasi dengan bendahara barang Puskesmas untuk membahas hal hal yang dianggap perlu untuk kelancaran proses pelaporan dan keuangan.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Rapat koordinasi dengan Bendahara Barang di UPT dan pembuatan grup whatsapp untuk percepatan informasi antara Dinas Kesehatan dan UPT nya. Menghimbau puskesmas untuk mengumpulkan laporan tepat waktu melalui group bendahara Puskesmas, memberikan penjelasan secara rinci terkait pembuatan laporan, menghimbau untuk lebih teliti dalam penyusunan laporan agar meminimalisir kesalahan.

Ketersediaan SDM di sub bagian keuangan dan aset terdiri dari Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2 (dua) orang, Analis Keuangan 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan 1 (satu) orang, Pengadministrasian Keuangan 3 (tiga) orang, dan Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan 2 (dua) org verifikator minimal lulusan D3

mengingat beban kerja verifikator di subbag keuangan yang cukup besar dan belum didukung ketenagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

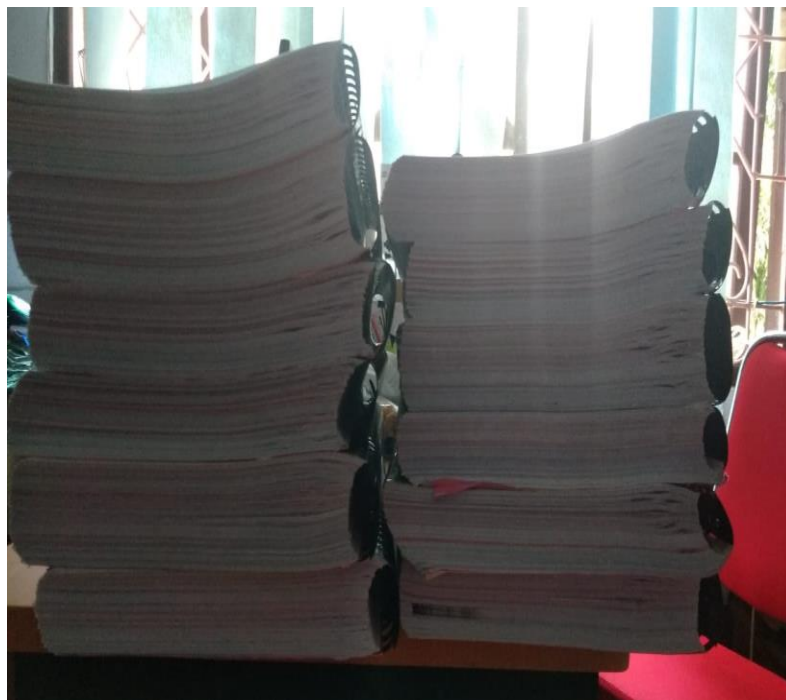
Tabel 3.16

Analisa Jabatan PNS di Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

No	Jabatan	Yang ada	Kebutuhan	-/+
1	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan aset	1	1	0
2	Analisis Keuangan	1	1	0
3	Bendahara	1	1	0
4	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	0	1	-1
5	Verifikator keuangan	0	3	-3
6	Pengelolaan pemanfaatan Barang milik Daerah	2	2	0
7	Pengelola keuangan	1	3	-2
8	Pengadministrasi keuangan	3	3	0

Foto-foto kegiatan :

1. Laporan Keuangan



2. Laporan Aset



○ Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan) A.3

Tabel. 3.17

Capaian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaoran	1 Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar	4 dokumen	4 dokumen	100%
		2 Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar	2 dokumen	2 dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4,169,000	3,815,000	92

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,999,000	1,865,000	14
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,540,000	5,650,000	54
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,860,000	1,800,000	63
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,860,000	2,500,000	87
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36,145,000	19,280,000	53
			Jumlah			69,573,000

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut nomor 8 juga dilaksanakan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan yang telah dijelaskan diatas.

Pada tahun 2021 dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan telah mendapatkan Nilai A (81,57) dari target nilai 72, dengan demikian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut tercapai.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 100 % dengan kategori sangat berhasil.

- a) Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar capaian 100%

Kendala terkait pencapaian indikator jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar yaitu perubahan sistem perencanaan dan Permendagri yang baru.

Saran perbaikan : lebih meningkatkan koordinasi terkait perubahan system dan permendagri yang baru dengan BPKA, Bappeda dan seluruh UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi : Peningkatan kegiatan koordinasi seluruh bidang dan unit di Dinas Kesehatan.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Rapat koordinasi dengan seluruh unit terkait Dinas kesehatan dengan menghadirkan narasumber dari BPKAD dan Bappeda.

- b) Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar capaian 100%

Kendala terkait pencapaian indikator jumlah dokumen pelaporan yang dibuat sesuai standar yaitu pengumpulan data dari pemegang program, kurang terintegrasinya data program, dan keterlambatan usulan anggaran dari masing-masing bidang dan Puskesmas serta Rumah Sakit.

Saran perbaikan : mengingatkan secara resmi melalui surat tertulis kepada bidang-bidang, Puskesmas dan Rumah Sakit untuk tertib nya sistem pelaporan dan usulan anggaran.

Rencana Aksi : Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) capaian kinerja bidang-bidang, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Hal-hal yang sudah dilakukan : Menghimbau puskesmas utk mengumpulkan laporan tepat waktu melalui group Kepala Puskesmas/Kepala Tata Usaha (KTU), menghimbau untuk lebih teliti

dalam menyusun laporan dan melakukan pengusulan anggaran tepat waktu.

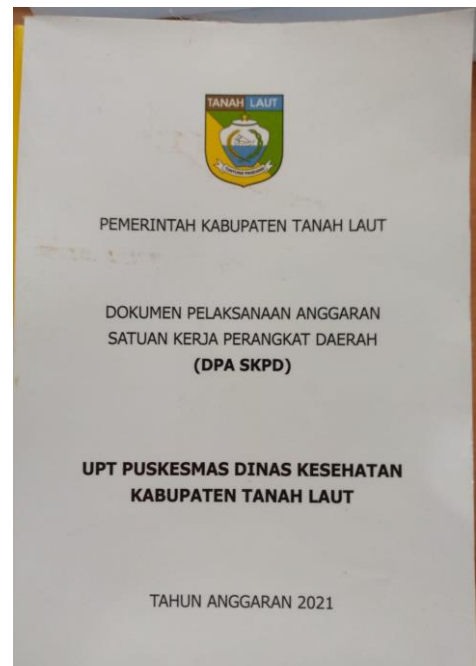
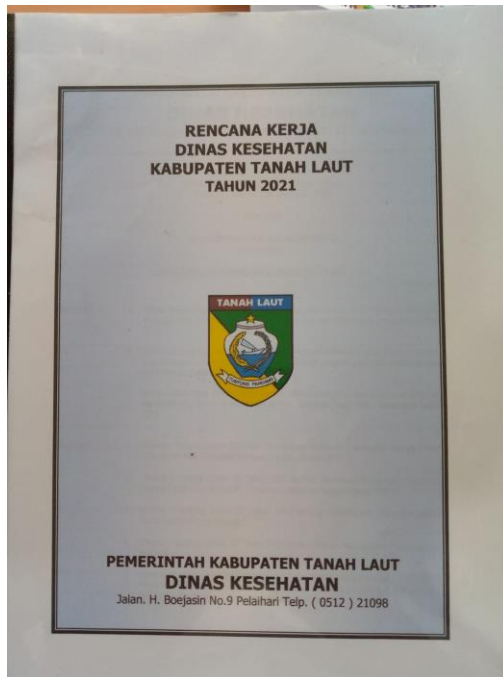
Ketersediaan SDM di sub bagian perencanaan dan pelaporan terdiri dari Pengelola Bahan Perencanaan 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 3 (tiga) orang dan pada akhir tahun ada penambahan 1 (satu) tenaga Pengadministrasi, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan tenaga Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan dan Tenaga Pengadministrasian Perencanaan dan Program. Adapun analisa jabatan yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Analisa Jabatan PNS di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

No	Jabatan	Yang ada	Kebutuhan	-/+
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	0
2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1	-1
3	Penyusun Program anggaran dan pelaporan	0	1	-1
4	Pengelola Bahan Perencanaan	1	2	-1
5	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	-1

Foto-foto kegiatan :

Dokumen perencanaan



Pertemuan Koordinasi terkait SIPD dan Permendagri No. 90 tahun 2019





Dokumen Pelaporan



4. Eselon III (Kepala Bidang) B

a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1, 2, 3 dan 4

Sasaran strategis Nomor 1, 2, 3 dan 4 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.19

Tabel Sasaran Strategis 1,2,3 dan 4

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2020			2021			2023
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	85%	80%	94%	90%	87%	97%	100%
	2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	85%	90%	106%	90%	96%	107%	100%
	3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	92%	96%	104%	95%	101%	106%	100%
	4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	90%	77%	86%	92%	100%	109%	100%
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	27%	68%	45%	49.78%	111%	60%
	2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	87%	87%	100%	79%	79%	100%

Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,	1. Persentase desa STBM	53,8%	71%	132%	69,2%	69,67%	101%	100%
	2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	61%	76%	80%	67,85%	85%	80%
	3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	81%	116%	70%	50,9%	73%	70%
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian				97%			96,8%	

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan tahun 2021 sebesar 96,8 % dengan kategori sangat berhasil. Adapun sasaran yang dicapai yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 4 indikator yang harus dicapai diantaranya;
 - a. Persentase ibu hamil yang dilayani sesuai standar. Perhitungannya melalui jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar pada tahun 2021 dimana dari target ibu hamil sebanyak 6650 orang dan realisasi sebanyak 5817 orang sehingga diperoleh capaian sebesar 87%. Pada tahun 2021 targetnya 90% dan realisasi sebesar 87% hal ini masih berada dibawah target, sehingga nilai capaian hanya 97%. Ini berarti pada tahun 2021 capaiannya mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 80% dari terget 85% dimana capaian kinerjanya sebesar 94%, serta berada dibawah target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
 - b. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai standar dimana jumlah ibu bersalin yang dilayani sesuai standar pada tahun 2021 sebanyak

6375 orang dari target sebanyak 6650 dan diperoleh persentase realisasi sebesar 96%. Pada tahun 2021 targetnya 90% dan realisasi sebesar 96% hal ini telah mencapai target, sehingga nilai capaian sebesar 107%. Namun untuk capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Dimana Realisasi pada tahun 2020 sebesar 90% dari target 85% dengan capaian kinerja sebesar 106%. Dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%.

- c. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar dimana pada tahun 2021 jumlah bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar 6332 orang dari target 6254 orang dan diperoleh persentase realisasi sebesar 101%. Pada tahun 2021 targetnya 95% dan realisasi sebesar 101% hal ini telah mencapai target, sehingga nilai capaian sebesar 106%. Namun untuk capaian ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Dimana Realisasi pada tahun 2020 sebesar 96% dari target 92% dengan capaian kinerja sebesar 104%. Dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%.
- d. Persentase Balita yang mendapat pelayanan sesuai standar dimana pada tahun 2021 jumlah bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar 6332 orang dari target 6254 orang dan diperoleh persentase realisasi sebesar 101%. Pada tahun 2021 targetnya 92% dan realisasi sebesar 100% hal ini telah mencapai target, sehingga nilai capaian hanya sebesar 109%. Capaian inipun mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Dimana Realisasi pada tahun 2019 sebesar 77% dari target 90% dengan capaian kinerja sebesar 86%. Dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%.

Dari ke empat indikator sasaran di atas seluruhnya mengalami peningkatan dalam hal capaian kinerja. Hal ini disebabkan kasus pandemi covid 19 mulai menurun sehingga kegiatan mulai bisa dilaksanakan. Selain itu peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan seperti mengusulkan penambahan tenaga kesehatan khususnya Bidan Desa. Untuk pendanaan dalam hal kegiatan pelayanan ibu hamil.

2. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 2 indikator yang harus dicapai diantaranya;
 - a. Persentase Rumah tangga yang berPHBS dimana berdasarkan dari jumlah rumah tangga yang berPHBS dari target 3000 rumah tangga dan realisasi sebesar 1.480 rumah tangga sehingga mencapai persentase 49,78% . Pada tahun 2021 targetnya 40% dan realisasi sebesar 49,78%. dengan nilai capaian sebesar 111%. Ini berarti pada tahun 2021 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 60% dari target 40% dimana capaian kinerjanya sebesar 150%. Namun telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Adapun kendala yang dihadapi yang menyebabkan penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu tidak terlepas dari dampak adanya pandemi Covid 19. Kemudian kendala lain juga kurang koordinasi dengan PKK desa dimana PKK desa juga melaksanakan kegiatan PHBS tapi ada beberapa Puskesmas yang jalan sendiri-sendiri. Namun kendala tersebut tidak membuat capaian rendah terhadap target yang ada, sehingga capaian masih bisa di atas 100%. Adapun sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Kepala seksi promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi dan 2 orang PTT tenaga Administrasi. Keberhasilan indikator tersebut tidak terlepas dari seluruh sumber daya yang digunakan baik SDM, sarana dan prasarana maupun pendanaan tetap digunakan secara efisien mungkin untuk ketercapaian kegiatan.
 - b. Persentase desa yang melaksanakan Gerakan masyarakat sehat untuk tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Yaitu untuk realisasi tahun 2021 sebanyak 64 desa yang telah menyelenggarakan Gerakan masyarakat hidup sehat dari jumlah desa yang ditargetkan yaitu sebanyak 81 desa di kabupaten Tanah Laut dengan persentase sebesar 79% dari target sebesar 100% sedangkan di tahun 2020 realisasi sebesar 87% dengan target

sebesar 100%. Dapat dilihat bahwa untuk ketercapaian target jangka menengah tahun 2023 belum tercapai yaitu sebesar 100%. Adapun masih ada kendala kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat seperti tidak ada senam bersama karena merupakan kegiatan yang mengumpulkan massa dimana pada tahun 2021 diberlakukan kebijakan untuk mengurangi bahkan meniadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masa. Adapun sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Kepala seksi promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.

3. Meningkatnya Kesehatan lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 3 indikator yang harus dicapai diantaranya;
 - a. Persentase Desa STBM dimana jumlah desa yang melaksanakan STBM dari target 93 desa dari jumlah seluruh desa 135 desa dan realisasi sebanyak 94 desa sehingga jumlah persentase sebesar . Pada tahun 2021 targetnya 53,80% dan realisasi sebesar 71% dengan nilai capaian sebesar 189%. Ini berarti pada tahun 2021 capaiannya mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Dimana realisasi pada tahun 2019 sebesar 61% dari target 32,3% dimana capaian kinerjanya sebesar 132%. Dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Adapun penyebab peningkatan ketercapaian tersebut dikarenakan terlalu rendahnya target rentra yang dibuat dan dukungan sumber dana yang berasal dari APBN yang menjadikan seluruh Puskesmas mendapat dana untuk pelaksanaan STBM. Adapun sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, 1 orang Pengolah kesehatan lingkungan dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.
 - b. Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan dimana jumlah TTU (Tempat Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Tanah Laut dari target 560 tempat yang memenuhi syarat

sebesar 344 tempat sehingga persentase ditahun 2021 sebesar 61%. Pada tahun 2021 targetnya 80% dan realisasi sebesar 61% dengan nilai capaian sebesar 77%. Ini berarti pada tahun 2021 dan tahun 2020 tidak mengalami perubahan dan tetap pada angka capaian yang sama. Namun hal ini belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 80%. Adapun tidak adanya peningkatan pada capaian indikator tersebut dikarenakan keterbatasan kegiatan yang diakibatkan adanya pandemi Covid 19. Adapun sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, 1 orang Pengolah penyehatan lingkungan dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.

- c. Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan dimana jumlah TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Tanah Laut dari target 2000 tempat yang memenuhi syarat sebesar 1018 tempat sehingga persentase ditahun 2021 sebesar 50,9%. Pada tahun 2021 targetnya 70% dan realisasi sebesar 50,9% dengan nilai capaian sebesar 73%. Ini berarti pada tahun 2021 dan tahun 2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 realisasi sebesar 81% dari target 70% Hal ini belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 70%. Adapun tidak adanya peningkatan pada capaian indikator tersebut dikarenakan keterbatasan kegiatan yang diakibatkan adanya pandemi Covid 19. Adapun sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, 1 orang Pengolah penyehatan lingkungan dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.
4. Meningkatnya kesehatan Kerja dan Olah Raga. Untuk mencapai sasaran tersebut yaitu indikator persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga dari jumlah seluruh puskesmas di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 19 Puskesmas dan seluruhnya melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga sehingga persentasenya sebesar 100% . Dalam hal ini baik di tahun 2021 maupun

2020 tidak ada perubahan dari target 100% dan realisasinya sebesar 100% dengan nilai capaian sebesar 100%. dan untuk ketercapaian terhadap target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100% telah dicapai. Adapun keberhasilan indikator tersebut dikarenakan di seluruh puskesmas telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga. Untuk SDM yang mengelola mencukupi dan sumber pendanaan yang sesuai. Adapun sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung indikator tersebut yaitu 1 orang Kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, 1 orang Pengolah penyehatan lingkungan dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 1, 2. 3 dan 4 Bidang Kesehatan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan olahraga dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sebagaimana berikut:

1) Eselon IV (Kepala Seksi Promosi Kesehatan) B.1

Tabel.3.20

Capaian Kinerja Kepala Seksi Promosi Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Jumlah Penyediaan Media Promosi Kesehatan	22	22	100%
2.	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	1 Jumlah Rumah Tangga berPHBS	1.3500	1.480	111%
		2 Jumlah Saka Bhakti Husada yang dibina	1	1	100%
		3 Jumlah Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	27	17	63%

3.	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sekolah	1 Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan (UKS) sesuai standar	2661	2661	100%
4.	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Promosi Kesehatan	1 Jumlah Puskesmas yang aktif melaporkan kegiatan promosi kesehatan	19	19	100%
Rata-Rata Capaian					95,6%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	57,430,000	31,453,000	55
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	715,582,000	404,891,250	57
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	97,951,900	52,680,750	54
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	3,167,271,48	3,048,093,75 9	96

	Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersih dan Sehat			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	51,727,500	12,011,250	23
Jumlah			4,089,963,044	3,549,130,00	86,7

Dalam rangka mendukung sasaran strategis yang di ampu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nomor 2 dilaksanakan oleh Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan dan Program Bantuan Operasional Kesehatan, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Promosi Kesehatan yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 95,6 % dengan kategori sangat berhasil.

a) Indikator jumlah pembinaan kemitraan dan koordinasi dengan UKBM sudah 100%

- Kendala : Dikarenakan pandemi Covid-19 banyak kegiatan yang Usaha Kesehatan yang Berbasis Masyarakat (UKBM) yang tidak maksimal dilakukan, antara lain : Posyandu, UKS dan lain-lain.
- Saran perbaikan : Semua kegiatan UKBM dilakukan dengan cara menjemput bola dengan arti kegiatan Posyandu dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan datang ke rumah warga dan yang dilakukan hanyalah penimbangan balita saja.

- Rencana Aksi/Rencana Tindak lanjut : Kegiatan UKBM akan dilakukan dengan cara melatih petugas yang melaksanakan kegiatan untuk menggunakan google form untuk melakukan kegiatan penjangkaran kesehatan pada usia pendidikan dasar dan kegiatan yang dapat difasilitasi dengan menggunakan google form.
- Hal - hal yang sudah dilakukan : Ada sebagian petugas dalam melaksanakan kegiatan UKBM sudah menggunakan google form untuk melakukan penjangkaran kesehatan pada anak usia pendidikan dasar.

b) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) hanya 64%

- Kendala: adanya Pandemi COVID-19 tahun 2021 sehingga kegiatan survei PHBS hanya sempat dilakukan di triwulan IV Tahun 2021 karena sebelumnya adanya pembatasan kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19, kendala lain juga kurang kurang koordinasi dengan PKK desa dimana PKK desa juga melaksanakan kegiatan PHBS tapi ada beberapa Puskesmas yang jalan sendiri-sendiri.
- Saran perbaikan : Memperkuat koordinasi dengan PKK desa untuk bersama-sama melaksanakan survei PHBS sehingga memudahkan melaksanakan kegiatan dan data juga hasilnya sama serta juga dilakukan Survei PHBS dengan cara elektronik atau diuji coba menggunakan google form untuk melakukan survei PHBS.
- Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan kegiatan survei PHBS dengan menggunakan protokol kesehatan dan dicoba menggunakan google form untuk mengisi survei PHBS yang akan dilakukan di Tahun 2021.
- Hal-hal yang sudah dilakukan : Melakukan kegiatan informasi dan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan menggunakan media elektronik dan media sosial agar masyarakat lebih mengerti pentingnya Perilaku hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini.

Ketersediaan SDM di Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan tenaga Pengolah Data Penyuluhan dan Pelayanan Informasi 1 (satu) orang, Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 1 (satu) orang dan Pengadministrasi Umum 1 (satu) orang.

Contoh Foto-Foto Kegiatan :



Tanda Tangan Komitmen Germas, Stunting dan Desa ODF
oleh Bupati dan Kadinkes dalam kegiatan Manunggal
Tuntung Pandang di Kecamatan Bajuin



Lomba Sekolah Sehat Tingkat prov. Kalsel di SMP 1 Pelaihari



Workshop Pembinaan Pokjanal Posyandu Tk Kab. Tanah Laut

2) Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga) B.2

Tabel. 3.21

Capaian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
1.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Jumlah desa yang melaksanakan STBM	122	85	71
2.	Terlaksananya Pengawasan Kesehatan Tempat Tempat Umum	1. Jumlah TTU yang memenuhi Persyaratan Kesehatan	200	344	61,24
3.	Terlaksananya Pengawasan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan	1. Jumlah TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	2000	1018	61
		2. Jumlah Industri Rumah Tangga yang mempunyai sertifikat PIRT	1500	1331	80
4.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja	1. Jumlah orang yang dilayani tes kebugaran	500	50	10
		2. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja	19	19	100
5.	Terlaksananya Monitoring Pelayanan Kesehatan Olah Raga	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Olah Raga	19	19	100
Rata-Rata Capaian					69

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28,520,000	0	0
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	573,407,890	318,022,650	55
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38,450,200	4,268,000	11
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20,000,000	7,725,000	39
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan	24,777,500	10,893,750	44

		antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9,034,000	3,340,000	37
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7,470,000	1,023,750	14
Jumlah				701,659,590	345,273,150	49,20

Dalam rangka mendukung sasaran strategis yang di ampu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nomor 3 dan 4 dilaksanakan oleh Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olah Raga, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 85,2 % dengan kategori sangat berhasil.

Indikator yang belum mencapai target 100%:

1. Indikator Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM hanya 71 %

- a. Kendala: Recofusing Dan Pandemi Yang Menyebabkan Banyak Kegiatan Di Desa Di Tiadakan Karena Kegiatan STBM Banyak Melakukan Aksi Di Desa, Tidak Ada Lagi Tenaga Fasilitator STBM Kabupaten.
- b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
- c. Rencana aksi/tindak lanjut: Membuat Perbup STBM Di Tahun 2021.
- d. Hal-hal yang sudah dilakukan : Sudah Membuat Perbup STBM Tahun 2021.

2. Indikator Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan (61%)

- a. Kendala: Adanya Pandemi Covid 19 Yang Menyebabkan Banyak Kegiatan Pendataan Dan Pembinaan Penyehatan TTU di tiadakan Tahun 2021
- b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
- c. Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan penambahan kegiatan terkait penyehatan TTU di anggaran 2021.
- d. Hal-hal yang sudah dilakukan : melakukan penambah kegiatan terkait penyehatan TTU di anggaran 2021.

3. Indikator Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (61%)

- a. Kendala: Pandemi Yang Menyebabkan Banyak Kegiatan Pendataan Dan Pembinaan Penyehatan TPM di tiadakan Tahun 2021.

- b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
- c. Rencana aksi/tindak lanjut: melakukan pembinaan kepada puskesmas terkait penyelenggaraan penyehatan TPM di kawasan wilayah puskesmas.
- d. Hal-hal yang sudah dilakukan : melakukan penambahan kegiatan terkait penyehatan TPM di anggaran 2021.

4. Indikator Jumlah Industri Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (80%)

- a. Kendala: Recofusing dan Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan pendataan dan pengelolaan kepada pelaku usaha industri rumah tangga di tiadakan.
- b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
- c. Rencana aksi/tindak lanjut: Menambah jumlah peserta penyuluhan keamanan pangan di dinas kesehatan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan terkait salah satu syarat untuk membuat sertifikat PIRT.
- d. Hal-hal yang sudah dilakukan : Sudah menambah anggaran pagu di tahun 2021 untuk kegiatan penyuluhan keamanan pangan.

5. Indikator Jumlah Orang yang dilayani Tes Kebugaran (10%)

- a. Kendala:. Recofusing dan Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan Tes Kebugaran untuk Jamah Haji, Anak sekolah maupun Ke SKPD yang lain tidak bisa dilaksanakan.
- b. Saran perbaikan : Melakukan Inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa Pandemi COVID-19.
- c. Rencana aksi/tindak lanjut:. melakukan pembinaan kepada puskesmas terkait penyelenggaraan penyelenggaraan Tes Kebugaran Bagi Karyawannya maupun Ke Sekolah Sekolah di wilayah puskesmas.
- d. Hal-hal yang sudah dilakukan :. melakukan penambahan kegiatan terkait penyehatan TPM di anggaran 2021.

Ketersediaan SDM di Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga terdiri dari Pengelola Kesehatan Lingkungan 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan tenaga Analis Kesehatan Kerja 1 (satu) orang dan Pengadministrasi Umum 1 (satu) orang.

Contoh Foto-Foto Kegiatan





3) Eselon IV (Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat)

B.3

Tabel. 3.22

Capaian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (pusdatin)	Realisasi	% 6=5/4 (pusdatin)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar	6650	5817	87
		Jumlah ibu bersalin yang dilayani sesuai standar	6650	6375	96
		Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat pemberian Makanan Tambahan	1450	864	60
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang dilayanai sesuai standar	6254	6332	101
		Jumlah Balita Gizi Kurus (Wasting) yang dilayani sesuai satndar	1144	1144	100
		Jumlah Balita Gizi Kurang yang mendapat Pemberian Makanan Tamabahan	1598	1598	100
		Jumlah Dokumen Pemetaan Status Gizi yang sesuai standar	1	1	100
		Jumlah Kematian Ibu yang di Evaluasi	12	17	141
		Jumlah Kematian Bayi yang di Evaluasi	101	72	71
		Rata-Rata Capaian			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	334,082,500	300,280,500	90
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,526,192,704	495,999,043	32
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,027,500	58,882,500	59
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	93,294,400	72,720,667	78
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,315,487,400	541,930,101	41
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	87,999,000	29,260,000	33
			Jumlah			3,456,083,504

Dalam rangka mendukung sasaran strategis yang di ampu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nomor 1 (satu) dilaksanakan oleh Kegiatan PERNBinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dengan rincian kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 95,1 % dengan kategori berhasil.

Kendala : adanya Pandemi COVID-19 terjadi peningkatan kasus kematian Ibu maupun Bayi.

Saran perbaikan : melaksanakan inovasi kegiatan di masa Pandemi COVID-19

Rencana Aksi : melaksanakan kegiatan yang bisa dilaksnakan secara daring. Segera melaksanakan kegiatan ketika kasus pandemic COVID-19 mulai menurun

Hal-hal yang sudah dilakukan ;

Mebuat surat ke UPT Puskesmas terkait kegiatan pelayanan program kesga, melakukan evaluasi kegiatan melalui daring terhadap masalah yang muncul, melakukan koordinasi dengan tim AMP kabupaten terkait kematian ibu dan Bayi.

Ketersediaan SDM Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat terdiri dari Analis Kesehatan Ibu dan Anak 1 (satu) orang, Pengelola Program Kesehatan Keluarga 3 (tiga) orang, Analis Gizi 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 1 (satu) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan Pengadministrasi Umum 1 (satu) orang.

Contoh Foto-Foto Kegiatan:



Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan



Kunjungan Ibu Nifas



Penilaian Kinerja Bidan



Kunjungan Bayi Baru Lahir



Pelayanan Kesehatan Balita



Balita Gizi Buruk / Wasting yang Mendapatkan Pelayanan dan PMT



Balita Gizi Buruk / Wasting yang di lakukan pengukuran



Pemberian PMT pada balita wasting



Pemberian PMT dan pengukuran BB dan TB pada balita wasting



Balita Gizi kurang/Underweight dapat PMT



Pemberian PMT pada balita gizi kurang/Underweight



Ibu Hamil Mendapatkan PMT



Ibu Hamil KEK Mendapatkan PMT

b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 7

Sasaran strategis Nomor 7 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.23

Tabel Sasaran Strategis 7

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2020			2021			2023
93	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	65%	100%	154%	70%	78%	103%	80%
	2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	89%	100%	112%	95%	90,5%	90%	100%
	3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	87%	100%	115%	90%	81%	90%	100%
	4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	60%	60%	100%	95%	95%	100%
Rata-Rata Capaian				110%				94,5%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **94,5 % dengan kategori berhasil**. Adapun sasaran yang harus dicapai yakni Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 4 indikator sasaran yaitu;

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar dimana jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar di kabupaten Tanah Laut. Realisasi di tahun 2021 sebesar 78% dari target 70% sehingga capaiannya sebesar 103%. Hal ini mengalami penurunan

dibanding tahun 2020 realisasinya sebesar 100% dari target 65% dan capainnya yaitu sebesar 154%. ketercapaian indikator sasaran tersebut ialah adanya kerjasama tim yang baik dan pengawasan yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid 19. Sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal pendanaan kegiatan banyak dibebankan ke APBN. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Fasilitas pelayanan kesehatan, 1 orang penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana, 1 orang pengadministrasi data penyajian dan publikasi dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.

2. Persentase Puskesmas dengan Alat kesehatan yang sesuai standar dimana jumlah alat kesehatan yang sesuai standar dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang memenuhi standar. Ditahun 2021 realisasi sebesar 90,5% dari target sebesar 95% dan capaian sebesar 90%. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang realisasinya hanya 100% dari target 89% dan capaian sebesar 112%. Dengan demikian capaian indikator sasaran belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Kendala : Target belum sesuai, prioritas kebutuhan sesuai anggaran, dan kenaikan harga diluar batas kewajaran. Saran perbaikan : Tetap merencanakan dan mengusulkan anggaran kegiatan untuk pemenuhan alat kesehatan yang terstandar.

Rencana Aksi : Melakukan pendataan alat kesehatan yang sesuai standar pada UPT Dinas Kesehatan dan melakukan survey harga untuk rencana pengadaan pada tahun berikutnya.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 1 orang Analis Data dan Informasi, 1 orang Pengelola Kefarmasian dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.

Persentase Obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional dari jumlah obat dan BMHP sebanyak 191 jenis ditargetkan sebanyak 172

jenis obat dan BMHP yang terpenuhi namun realisasi hanya sebanyak 154 jenis obat dan BMHP dengan persentase sebesar 81%. Ditahun 2021 realisasi sebesar 81% dari target sebesar 90% dan capaian sebesar 90%. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang realisasinya sebesar 100% dari target 87% dan capaian sebesar 115%. Dengan demikian capaian indikator sasaran telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun penyebab keberhasilan dari capaian indikator tersebut ialah ketersediaan obat dan BMHP memang sudah disesuaikan dengan standar yang ada dan kerjasama serta pengawasan yang tepat dari bidang terkait. Dalam segi pendanaan memang sudah dilakukan secara efisien dan efektif agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 1 orang Analis Data dan Informasi, 1 orang Pengelola Kefarmasian dan 2 orang PTT tenaga Administrasi.

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dimana jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dengan target sebanyak . Ditahun 2021 realisasi sebesar 95% dari target 100% dan capaian masih dibawah dari target yaitu sebesar 100%. Meski demikian untuk ketercapaian mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 dengan realisasi sebesar 60% dari target 100% dan capaiannya hanya 60%. Namun, hal ini masih belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut ialah terdapatnya refocusing anggaran di tahun 2021 yang difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid 19 dan terbatasnya bimtek/ pelatihan dimasa pandemi. Untuk perbaikan kedepan maka dilakukan pengusulan penambahan pagu untuk kegiatan tersebut terutama yang berkaitan dengan bimtek/ pelatihan agar perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan dapat terpenuhi sesuai standar. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, 1 orang pengelola profesi Sumber Daya Manusia, 1 orang PTT tenaga Administrasi.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Farmasi dan Alkes serta Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021, yang akan dijelaskan per seksi/eselon sebagai berikut:

1) Eselon IV (Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan) B.4

Tabel. 3.24

Capaian Kinerja Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya Penyediaan sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Jumlah . Pembangunan gedung fasilitas kesehatan sesuai standar	7 buah	7 buah	100%
		2 Jumlah Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31 buah	31 buah	100%
2	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53 buah	53 buah	100%
		2 Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana	10 buah	10 buah	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106,535,000	105,710,490	99
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,265,690,000	2,987,057,700	91
			Pengembangan Puskesmas	14,065,090,091	13,850,054,813	98
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,530,868,002	7,200,320,470	96
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7,737,690,474	6,484,366,413	84
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,174,346,499	3,831,469,735	92
Jumlah				36,880,220,066	34,458,979,621	93,4

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan juga oleh Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan), dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Kendala : Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala status lahan dan pengaruh alam (Pasca banjir) dan gagal lelang.

Saran perbaikan : Tetap melakukan perencanaan dan pengusulan anggaran kegiatan untuk pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rencana Aksi : Melakukan Pemutakhiran Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan di semua UPT Dinas Kesehatan

Hal-hal yang sudah dilakukan : Melakukan rekapitulasi fasilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan rehabilitasi maupun pemenuhan kebutuhan sumber daya lainnya.

Ketersediaan SDM Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 (satu) orang, Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 1 (satu) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan Tenaga Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 1 (satu) orang.

Foto-Foto Kegiatan :

Pembangunan gedung fasilitas kesehatan sesuai standar

Penambahan Gedung Puskesmas Tirta jaya



Penambahan Gedung Puskesmas Sungai Riam



Penambahan Gedung Puskesmas Tanjung Habulu



Penambahan Gedung Puskesmas Pelaihari



Rekapitulasi Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	LOKASI	BESARAN KONTRAK/REALISASI	REALISASI	NO KONTRAK/KWITANSI	JANGKA WAKTU KONTRAK (TGL MULAI s.d AKHIR PEKERJAAN)	PENYEDIA	
1	Cardtridge hitam		17	buah	Dinkes	9.437.500	9.437.500	INV-1621561300	Friday, 21 May 2021	Toko Al-Razzaq
	Cardtridge warna		10	buah	Dinkes					
	Flashdisk OTG		5	buah	Dinkes					
2	Bantal	2.758.250	25	buah	UPT Puskesmas	2.758.250	6.095.000	INV-1635479239	29 Oktober 2021 s.d 1 November 2021	CV.Raudah
	Seprai	4.400.000	20	set	UPT Puskesmas	4.400.000				
3	Gorden puskesmas baru	26.400.000	80	meter	UPT Puskesmas	26.400.000	25.840.000	INV-1636444214	9 November 2021 s.d 22 November 2021	CV.Raudah
4	Helm pelindung kepala	2.453.220	7	buah	UPT Puskesmas	2.453.220	1.169.000	INV-16230330178	Monday, 07 June 2021	Toko Al-Razzaq
5	Rompi	2.407.790	7	buah	Dinkes	2.407.790	1.855.000	INV-1626923392	Thursday, 22 July 2021	Toko Naufal
6	Sepatu safety	5.905.900	7	pasang	Dinkes	5.905.900	4.830.000	INV-1623205467	Wednesday, 09 June 2021	Toko Al-Razzaq
7	Mobil Pusling	497.200.000	2	unit	UPT Puskesmas	479.529.600	479.529.600	027/17/SP/Tender-Mobil Pusling/Dinkes/2021	75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender 14 September 2021 s.d 28 November 2021	PT.Mitra Megah Profitamas
8	Kendaraan		6	unit	Dinkes	184.296.000	184.296.000	027/ 15-PL/VIII/SPK/Sepeda	60 (enam	CV. Surya

	Bermotor	184.800.000					Motor/2021	puluh) Hari Kalender 25 Agustus 2021 s.d 23 Oktober 2021	Prima Banjarbaru
9	Pengadaan Kendaraan	79.999.964	4 buah	UPT Puskesmas	77.200.000	77.200.000	027/30/Brg-EP/2021	30 (tiga puluh) Hari Kalender 25 Oktober 2021 s.d 23 November 2021	CV. Trio Motor Pelaihari
10	Ambulance	704.000.000	2 unit	UPT Puskesmas	641.652.000	641.652.000	027/16/SP/Tender-Mobil Ambulance/Dinkes/2021	75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender 15 September 2021 s.d 29 November 2021	PT. Mitra Megah Profitamas
11	Alat Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) (DID)	36.100.000	38 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	35.967.000	35.967.000	INV-1628478181	9/08/2021 s.d 12 /08/2021	Toko Al Razzaq
12	Lemari Arsip	343.200.000	80 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	296.960.000	296.960.000	027/ 24 /Brg-EP/2021	80 (delapan puluh) Hari Kalender 3 September 2021 s.d 21 November 2021	PT. Datascip
13	Filling Kabinet	97.350.000	30 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	92.550.000	92.550.000	027/ 25 /Brg-EP/2021	80 (delapan puluh) Hari Kalender 6 September 2021 s.d 24	PT. Datascip

								November 2021	
14	Pengadaan Proyektor	66.083.160	3 buah	UPT Puskesmas	57.420.000	57.420.000	027/42-PL/XI/SPK/PROYEKTOR/2021	10 (sepuluh) Hari Kalender 18 November 2021 s.d 27 November 2021	Sabil Computer Pelaihari
15	Kursi Kerja	439.476.840	627 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	305.054.000	305.054.000	027/27/Brg-EP/2021	72 (tujuh puluh dua) Hari Kalender 27 September 2021 s.d 7 Desember 2021	PT. Deka Sari Perkasa
16	Kursi tunggu pasien	459.327.000	100 set	UPT Puskesmas	398.300.000	398.300.000	027/ 22 /Brg-EP/2021	80 (delapan puluh) Hari Kalender 3 September 2021 s.d 21 November 2021	PT. Datascrip
17	Pengadaan Sofa	38.936.920	4 set	UPT Puskesmas	38.754.544	38.754.544	INV-1632964317	11 (sebelas) Hari Kalender 1 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2021	Nudi Interior
18	Tempat sampah 120 L	8.250.000	10 buah	UPT Puskesmas	197.789.680	197.789.680	027/31/PL/Dinkes/2021	30 (tiga puluh) Hari Kalender 29 Oktober 2021 s.d 27 November 2021	
	Tempat Sampah (DID)	269.961.120	208 buah	UPT Puskesmas					

	Tempat sampah 240 L	10.383.120	8 buah	UPT Puskesmas					
19	Pengadaan AC unit 1 PK	77.873.400	12 unit	UPT Puskesmas	197.208.000	197.208.000	027/ 41-PL/XI/SPK/AC 1 PK dan 3/4 PK/2021	30 (tiga puluh) Hari Kalender 11 November 2021 s.d 10 Desember 2021	CV. Dian Samudera
	Pengadaan AC Unit 3/4 PK	148.500.000	30 unit	UPT Puskesmas					
20	Belanja Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	4.950.000	6 buah	UPT Puskesmas	4.860.000	4.860.000	INV-1633923368	Monday, 11 October 2021	CV.Raudah
21	Pengadaan Televisi 32	13.900.590	3 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	13.732.950	13.732.950	INV-1633506253	2 (dua) Hari Kalender 6 Oktober 2021 s.d 7 Oktober 2021	Toko Satelit
22	Sound system rapat	22.000.000	1 set	Dinkes	21.877.817	21.877.817	INV-1633056899	1 Oktober 2021 s.d 2 Oktober 2021	Toko Satelit
23	Sound system set Puskesmas	15.400.000	2 set	UPT Puskesmas	15.368.182	15.368.182	INV-1633415704	2 OKTOBER 2021 S.D 5 OKTOBER 2021	Toko Satelit
24	Pengadaan Televisi (DID) Televisi 65	29.851.470	1 unit	Dinkes	22.508.640	22.508.640	INV-1633503454	6 (enam) Hari Kalender 6 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2021	Toko Satelit
25	Tempat cuci tangan portable	380.000.000	200 buah	UPT Puskesmas	373.450.000	373.450.000	027/20/SP/Tender-Tempat Cuci Tangan Portable/Dinkes/2021	75 (tujuh puluh lima) Hari	CV. Telaga Mas

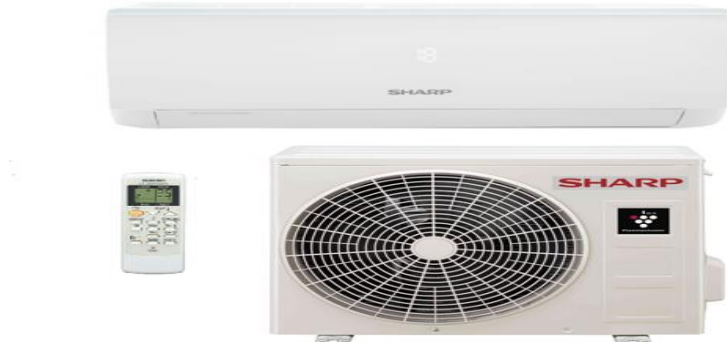
	(DID)							Kalender 27 September 2021 s.d 10 Desember 2021	
26	Pengadaan meja kerja	681.885.600	240 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	599.280.000	599.280.000	027/ 23 /Brg-EP/2021	80 (delapan puluh) Hari Kalender 3 September 2021 s.d 21 November 2021	PT. Datascip
27	Kursi rapat	108.873.600	60 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	87.460.000	87.460.000	027/ 26 /Brg-EP/2021	80 (delapan puluh) Hari Kalender 07 September 2021 s.d 25 November 2021	PT. Datascip
28	Generator Set 10 KVA	176.000.000	2 buah	UPT Puskesmas	171.600.000	171.600.000	027/40 PL/XI/SPK/ GENERATOR SET 10 KVA/2021	30 (tiga puluh) Hari Kalender 10 November 2021 s.d 9 Desember 2021	CV. Fajar Pratama
29	UPS	23.154.560	16 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	22.500.000	22.500.000	027/33/Brg-EP/2021	42 (empat puluh dua) Hari Kalender 1 November 2021 s.d 12 Desember 2021	PT. Tihang Banua Borneo
30	Komputer (PC)	438.424.800	40 unit	Dinkes dan UPT Puskesmas	383.120.000	383.120.000	027/29/Brg-EP/2021	60 (enam puluh) Hari Kalender	PT. Tihang Banua Borneo

								22 Oktober 2021 s.d 20 Desember 2021	
31	Pengadaan Laptop	82.494.720	8 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	73.272.000	73.272.000	027/28/Brg-EP/2021	60 (enam puluh) Hari Kalender 22 Oktober 2021 s.d 20 Desember 2021	PT. Tihang Banua Borneo
32	Laptop	51.559.200	5 unit	Dinkes dan UPT Puskesmas	46.045.000	46.045.000	027/36/Brg-Ep/2021	40 (empat puluh) Hari Kalender 4 November 2021 s.d 13 Desember 2021	PT. Tihang Banua Borneo
33	Tablet PC	399.784.000	44 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	380.160.000	380.160.000	027/34/Brg-Ep/2021	45 (empat puluh lima) Hari Kalender 28 Oktober 2021 s.d 11 Desember 2021	CV. Mega Teknik
34	Printer	20.768.000	20 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	18.032.200	18.032.200	027/38/Brg-Ep/2021	40 (empat puluh) Hari Kalender 8 November 2021 s.d 17 Desember 2021	PT. Tihang Banua Borneo
35	Printer + fotokopi	89.944.800	30 buah	Dinkes dan UPT Puskesmas	87.972.300	87.972.300	027/37/Brg-EP/2021	40 (empat puluh) Hari Kalender 4 November 2021 s.d 13 Desember 2021	PT. Tihang Banua Borneo

36	Printer Portable	7.150.000	1 buah	Dinkes	5.800.000	5.800.000	INV-16366307436	11 November 2021 s.d 15 November 2021	Sabil Computer Pelaihari
37	Printer (DID)	71.062.200	30 unit	Dinkes dan UPT Puskesmas	62.580.000	62.580.000	027/19/Brg-EP/2021	60 (enam puluh) Hari Kalender 2 Agustus 2021 s.d 30 September 2021	PT. Airmas Borneo Jaya
38	UPS (DID)	72.358.000	50 unit	Dinkes dan UPT Puskesmas	59.000.000	59.000.000	027/20/Brg-EP/2021	60 (enam puluh) Hari Kalender 2 Agustus 2021 s.d 30 September 2021	PT. Airmas Borneo Jaya
39	Pengadaan Alat Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	990.000.000	2 unit	UPT Puskesmas	983.840.000	983.840.000	027/15/SP/Tender-IPAL Puskesmas/Dinkes/2021	90 (sembilan puluh) Hari Kalender	CV. Detrila Karya
								15 September 2021 s.d 14 Desember 2021	

Foto Pengadaan Prasarana Penunjang Fasilitas Pelayanan Keseha

Pengadaan AC



Pengadaan IPAL



Kursi Rapat



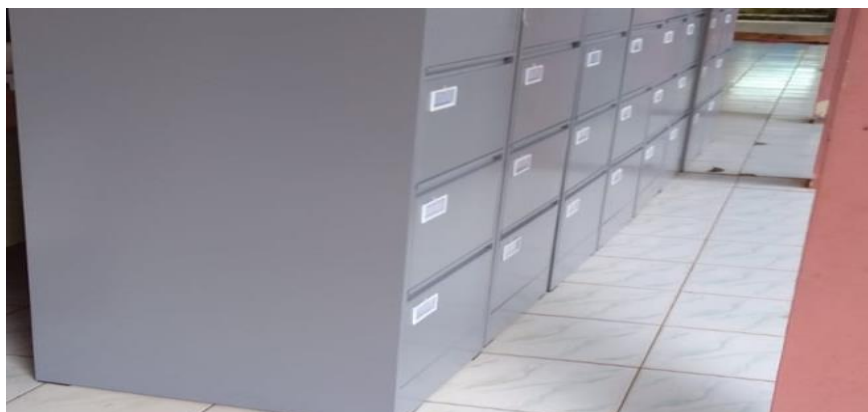
Kursi Kerja



Lemari Arsip



Filing Kabinet



Genset



Meja Rapat



Inventaris Barang
-3°54'0", 114°43'44", 51,9m
20/12/2021 10:53:55

Sofa



Kendaraan Roda 2 dan 4





2. Kursi Tunggu Pasien



2) Eselon IV (Kepala Seksi Farmasi dan Alkes) B.5

Tabel. 3.25

Capaian Kinerja Kepala Seksi Farmasi dan Alkes

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terlaksananya Penyediaan Alat Kesehatan dan Kefarmasian	1. Jumlah Puskesmas dengan alat kesehatan yang sesuai standar	19	19	100%
		2. Jumlah jenis pengadaan alat sesuai standar	5	5	100%
2	Terlaksananya Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan	1. Jumlah jenis alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi	6	5	83%
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian	1. Jumlah jenis Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai yang sesuai yang sesuai Formularium Nasional	191	154	81%
		2. Jumlah Puskesmas yang melaporkan stok opname obat sesuai standar	19	19	100%
		3. Jumlah pengadaan obat dan bahan medis habis pakai sesuai formularium nasional	19	19	100%
Rata-Rata Capaian					94 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20,000,000	7,725,000	39
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	6,681,101,070	4,637,958,636	69
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	2,867,574,706	1,841,969,350	64
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	174,825,000	96,270,080	55
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	71,957,500	28,221,250	39
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6,252,770,728	3,845,246,635	61
Jumlah				16,068,229,004	10,457,390,951	65

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan juga oleh Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Farmasi dan Alkes yang telah dijelaskan diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 94 % dengan kategori sangat berhasil.

Kendala : Ada beberapa kontrak yang tidak terealisasi akibat kenaikan harga diluar kewajaran harga dan ada beberapa puskesmas belum memiliki alat kesehatan sesuai standar ASPAK dan adanya puskesmas baru.

Saran perbaikan : pengadaan obat-obatan dilaksanakan lebih awal, diharapkan e katalog dapat lebih cepat dan lengkap tayangnya, melakukan pendataan alkes agar sesuai standar dan melaksanakan pengadaan alkes sesuai standar.

Rencana Aksi: melakukan pengadaan sesuai ekatalog pada awal waktu dan melakukan pendataan serta peninputan alkes sesuai standar melalui ASPAK.

Hal-Hal yang sudah dilakukan : melakukan pendataan kebutuhan obat (RKO), melakukan pendataan alkes dan melakukan peng inputan Data ASPAK, melaksanakan pengadaan alkes sesuai standar,

Ketersediaan SDM Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri dari Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang, Pengelola Kefarmasian 1 (satu) orang dan Tenaga PTT 2 (dua) orang, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) perlu penambahan Tenaga Pengelola Obat-Obatan dan Alat Kesehatan 1 (satu) orang dan Pengadministrasian Umum 1 (satu) orang

Contoh Foto-Foto Kegiatan

:





3) Eselon IV (Kepala Seksi SDM) B.6

Tabel.3.26
Capaian Kinerja Kepala Seksi SDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	150	18	12%
		2. Jumlah Pelaksanaan Diklat Tenaga Kesehatan	150	90	60%
2	Terlaksananya Pembinaan Tenaga Kesehatan	1. Jumlah rumpun tenaga kesehatan teladan yang dibina	9	9	100%
3	Terlaksananya Penerbitan Izin Praktek Medis	1. Jumlah Rekomendasi izin praktek Medis dan Paramedis yang dikeluarkan	150	150	100%
Rata-Rata Capaian					68%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16,312,000	2,722,500	17
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	20,479,928,535	16,066,065,329	78
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehata	40,775,000	1,170,000	3

		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229,757,800	139,616,071	61
Jumlah				20,766,581,335	16,209,573,900	78

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 7 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan juga oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi SDM..

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 68 % dengan kategori cukup. Perlu melakukan peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan baik dari segi penganggaran maupun inovasi kegiatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Kendala : terdapat refocusing anggaran di 2021 difokuskan untuk kegiatan penanganan Pandemi COVID-19, untuk uji kompetensi ASN yang akan naik jabatan tidak sebanyak target, Sarana Prasarana terkait Aplikasi Renbut dan Si-SDMK yang masih kurang (Wifi dan Laptop).

Saran perbaikan : usulan penambahan pagu anggaran kegiatan di tahun 2021, sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi (UKOM)

Rencana Aksi : Pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas, Digitalisasi UKOM, pertemuan Koordinasi terkait SIP (Surat Izin Praktik),

Hal-hal yang sudah dilakukan : UKOM secara manual, melakukan pengusulan anggaran

Ketersediaan SDM : analis perencanaan SDM Aparatur 1 (satu) orang, Pengelola SDMK 1 (satu) orang, Pengelola Profesi SDMK 1 (satu) orang, sesuai Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) SDM yg masih kurang Pengadministrasian Umum 1 (satu) orang

Sarpras yang kurang laptop dan Wifi.

Contoh Foto-Foto Kegiatan :

KEGIATAN PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN 2021



FOTO KEGIATAN PELEPASAN DOKTER INTERENSIP



PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PERAWAT DAN PERAWAT GIGI



c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 5

Sasaran strategis Nomor 5 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel.3.27

Tabel Sasaran Strategis 5

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2020			2021			2023
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	57%	57%	100%	81,7%	81,7%	100%
	2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	80%	80%	100%	70%	70%	100%
Rata-Rata Capaian				79%				84%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **84 % dengan kategori berhasil**. Dengan sasaran yaitu meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Adapun indikator sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Persentase orang dengan penyakit tidak menular yang dilayani sesuai standar jumlah target orang dengan penyakit tidak menular yang dilayani sebanyak 224.677 orang dan yang dilayani sebanyak 183.561 orang dengan persentase sebesar 81,7%. Di tahun 2021 realisasi sebesar 81,7% dari terget 100% dan capaian hanya sebesar 81,7%. Dan

mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yaitu realisasinya hanya 57% dari target 100% dan nilai capaian hanya 57%. Dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut masih belum mencapai target jangka menengah sebesar 100%. Ketidak tercapaian ini disebabkan kurangnya SDM yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu diusulkan penambahan SDM untuk seksi terkait. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, 1 orang pengelola pelayanan rehabilitasi sosial dan lansia dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.

- b) Persentase Desa bebas KLB penyakit menular dimana jumlah desa di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 135 desa dan seluruhnya bebas dari KLB penyakit menular. Di tahun 2021 realisasi sebesar 100% dari target 100% dan capaian sebesar 100%. Hal ini sama dengan capaian ditahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Keberhasilan capaian tersebut dikarenakan kerjasama semua pihak baik tenaga kesehatan maupun masyarakat. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, 1 orang pengelola Penyakit diak menular dan imunisasi, 1 orang pengelola program imunisasi, 1 orang Pengawa monitoring dan evaluasi imunisasi puskesmas, 1 orang PTT tenaga Administrasi.
- c) Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI) di tahun 2021 realisasi sebesar 70% dari target 100% dan capaian sebesar 70% dimana jumlah desa yang UCI ada sebanyak 95 Desa dari total seluruh desa sebanyak 135 desa. Dan

mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yaitu realisasinya hanya 80% dari target 100% dan nilai capaian hanya 80%. Dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Penurunan capaian indikator tersebut dikarenakan pengaruh pandemi Covid 19 dimana tahun 2021 peningkatan yang signifikan dari yang terkonfirmasi sehingga kegiatan ke luar gedung di batasi, yang menyebabkan kegiatan Imunisasi dapat berubah sewaktu-waktu, pekerjaan orang tua dan kurangnya SDM yang membantu. Untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektor demi ketercapaian kegiatan tersebut. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, 1 orang pengelola Penyakit diak menular dan imunisasi, 1 orang pengelola program imunisasi, 1 orang Pengawa monitoring dan evaluasi imunisasi puskesmas, 1 orang PTT tenaga Administrasi.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

1) Eselon IV (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi) B.7

Tabel.3.28

Capaian Kinerja Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya Pelayanan Imunisasi	1. Jumlah Desa UCI	135	95	70%
		2. Jumlah Bayi Imunisasi Dasar Lengkap	6.055	5.187	85.7%
2	Terlaksananya Pelayanan Surveilans	1. Jumlah Desa Kejadian Luar Bisa yang ditanggulangi sesuai standar	5	1	20%
		2. Jumlah Desa yang bebas KLB penyakit menular	125	135	108%
		3. Jumlah Jemaah Haji yang mendapat layanan kesehatan haji sesuai SOP	250	307	122%
3	Terlaksananya Monitoring Kegiatan surveilans dan Imunisasi	1. Jumlah Puskesmas yang aktif melaporkan Kegiatan surveilans dan capaian Imunisasi	19	19	100%
Rata-Rata Capaian					84%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5,054,515,000	2,888,472,000	57
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	13,585,000	0	
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	218,280,000	49,936,500	23
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	23,920,000	2,655,000	11
Jumlah				5,309,920,000	2,941,063,500	55,4

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan juga oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Seksi dan Surveilans diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 84 % dengan kategori berhasil.

a) Jumlah Desa UCI dengan capaian sebesar 70%

Kendala : di masa pandemi KLB COVID-19 meningkat sangat tinggi, Imunisasi tidak bisa dilakukan karena pembatasan massa yang secara otomatis mempengaruhi capaian UCI

Saran perbaikan : meningkatkan kerjasama lintas sektor, melakukan inovasi kegiatan agar kegiatan imunisasi tetap berjalan.

Rencana aksi : melakukan pemenuhan tenaga bidan desa/perawat desa yang masih kosong sebagai ujung tombak pelaksana imunisasi dan menambah tenaga kader posyandu kordinasi dengan lintas sektor di desa.

Hal hal yang sudah dilakukan : menyurati puskesmas untuk melakukan sweeping ke rumah-rumah yang mempunyai bayi dan balita untuk dilakukan imunisasi, mengusulkan kekurangan SDM di desa ke subbag umpeg untuk diteruskan ke BPKPSDM.

- b) Jumlah Bayi Imunisasi Dasar Lengkap dengan capaian 85,7%

Kendala : sasaran bayi baru yang akan diimunisasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kondisi pekerjaan orang tua yang berpindah-pindah/tidak menetap.

Saran perbaikan : diharapkan koordinator imunisasi meminta bantuan bidan desa untuk mendata domisili sasaran bayi baru lahir.

Rencana aksi : mengisi pustu dan polindes dengan tenaga kesehatan jangan ada yang kosong.

Hal hal yang sudah dilakukan : dilakukan sweeping rumah yang ada bayi baru lahirnya dengan bantuan kader posyandu untuk mendatanya.

- c) Jumlah Desa Kejadian Luar Bisa yang ditanggulangi sesuai standar dengan capaian 20%

Kendala : informasi yang di berikan kadang telat pada puskesmas terdekat karena jarak kejadian yang jauh.

Saran perbaikan : kerjasama dengan perangkat desa/ lintas sektor dalam pendataan kejadian di lapangan.

Rencana aksi : langsung petugas surveilans puskesmas turun ke lapangan menindak lanjuti serta merujuk ke RS terdekat.

Hal hal yang sudah dilakukan : berkoordinasi langsung surveilans puskesmas dengan surveilans kabupaten untuk di laporkan segera ke provinsi.

- d) Jumlah Desa yang bebas KLB penyakit menular dengan capaian 108%

Kendala : vaksinasi covid 19 awal pelaksanaan ketersediaan vaksin dari pusat yang kurang, karena masih diprioritaskan daerah yang masih tinggi konfirmasinya.

Saran perbaikan : meningkatkan kerjasama lintas sector untuk persiapan sasaran di lapangan

Rencana aksi : pelaksanaan vaksinasi jemput bola dengan langsung ke rumah rumah serta di desa

Hal hal yang sudah dilakukan : penambahan tim vaksinator dari sentra vaksin (eks RS H Boejasin)

- e) Jumlah Jemaah Haji yang mendapat layanan kesehatan haji sesuai SOP dengan capaian 122%

Kendala : selama pandemi ini keberangkatan haji di tunda karena negara Arab belum menerima.

Saran perbaikan : mengikuti peraturan Pemerintah selama pandemi belum berakhir dan semoga kasus terus menurun.

Rencana aksi : tetap melakukan tes kebugaran dan kesehatan calon Jemaah Haji.

Hal hal yang sudah dilakukan : rutin memeriksakan kesehatan pada puskesmas yang di tunjuk.

- f) Jumlah Puskesmas yang aktif melaporkan Kegiatan surveilans dan capaian Imunisasi dengan capaian 24%

Hal hal yang sudah dilakukan : pelaporan perminggu di kirim via wa an telpon.

Tanggal rekam/edit data	: 1 s/d 31																										
Bulan	: Januari																										
Tahun	: 2021																										
Periode KLB (Tanggal Mulai-Akhir)	:																										
<i>*diisi jika terjadi KLB</i>																											
No Urut	No. Epid Kasus	No KLB*	Nama Kasus	Nama Orang Tua	Alamat Lengkap (Desa/RT/RW)	Puskesmas	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Umur	Sex	Jenis Kelamin	Dosis Vaksinasi Campak Yang Diterima	Tanggal Vaksinasi Campak Terakhir	Tanggal Mulai Sakit	Tanggal Mulai Rash	Tanggal Laporan Diterima	Tanggal Pelacakan	Tanggal Ambil Sampel	Hasil Lab	Vitamin A	Keadaan Akhir	Klasifikasi				
										Tahun	Bulan								Serum	Urine	IgM Campak	IgM Rubella	Isolasi Virus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	160001021001		Rihadul Aisyah	Wahidah	Angsau RT.12	Angsau	Pelaihari	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	9		P	Tidak Tahu		11-01-21	11-01-21	13-01-21	13-01-21	13-01-21					Ya	H		

Format : C-1																											
LAPORAN CBMS KASUS CAMPAK INDIVIDU KABUPATEN																											
Tanggal rekam/edit data	: 1 s/d 31																										
Bulan	: Juli																										
Tahun	: 2021																										
Periode KLB (Tanggal Mulai-Akhir)	:																										
<i>*diisi jika terjadi KLB</i>																											
No Urut	No. Epid Kasus	No KLB*	Nama Kasus	Nama Orang Tua	Alamat Lengkap (Desa/RT/RW)	Puskesmas	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Umur	Sex	Jenis Kelamin	Dosis Vaksinasi Campak Yang Diterima	Tanggal Vaksinasi Campak Terakhir	Tanggal Mulai Sakit	Tanggal Mulai Rash	Tanggal Laporan Diterima	Tanggal Pelacakan	Tanggal Ambil Sampel	Hasil Lab	Vitamin A	Keadaan Akhir	Klasifikasi				
										Tahun	Bulan								Serum	Urine	IgM Campak	IgM Rubella	Isolasi Virus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	160000321002		Ahmad Hafiz	Nasrin	Desa Padang	Bati-Bati	Bati-Bati	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	7	8	L	Ya		19-07-21	19-07-21	19-07-21	19-07-21						Ya	H		

FP-PD										
SURVEILANS AKTIF DI RUMAH SAKIT										
LEMBAR PENGUMPULAN DATA										
Rumah Sakit	: RSUD H. Boejasin									
Tanggal Pengumpulan Data	: Januari s/d Desember 2021									
No. Urut	No. Register RS	Nama	Alamat	Umur	Diagnosa	Tanggal MRS	Keadaan Sekarang			
				L	P		Masih dirawat	Sudah pulang	Meninggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Penderita: Aditya Rifqi	Jl: Raya Takisung Gang Mandiri RT: 007 RW: 003	5,7		Atralgia, Muscle Spasme, Anemia	03-Sep-21		10-Sep-21	
		Orang Tua: M. Syafrudin	Kelurahan/Desa: Karang Taruna Kecamatan: Pelaihari							
2		Penderita: M. Fathoni	Jl: A. Yani RT: 04 RW: 02	6		Tetraparese + Scabies	13 Oktober 2021		17 Oktober 2021	
		Orang Tua: Ernellywanti	Kelurahan/Desa: Liang Anggang Kecamatan: Bati-Bati							
3		Penderita: Inayah Rahmatur	Jl: A. Yani RT: 01 RW: 01	12		AFP	28 Oktober 2021			
		Orang Tua: Ida Wahyuni	Kelurahan/Desa: Sumber Jaya Kecamatan: Kintap							
4		Penderita: Muhammad Ibnu Khair	Jl: Beramban Raya RT: 026 RW: 007	4		Atralgia, Susp. GNA, Anemia	25-Nov-21		29-Nov-21	
		Orang Tua: Miftahussalam	Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan: Pelaihari							



LIST

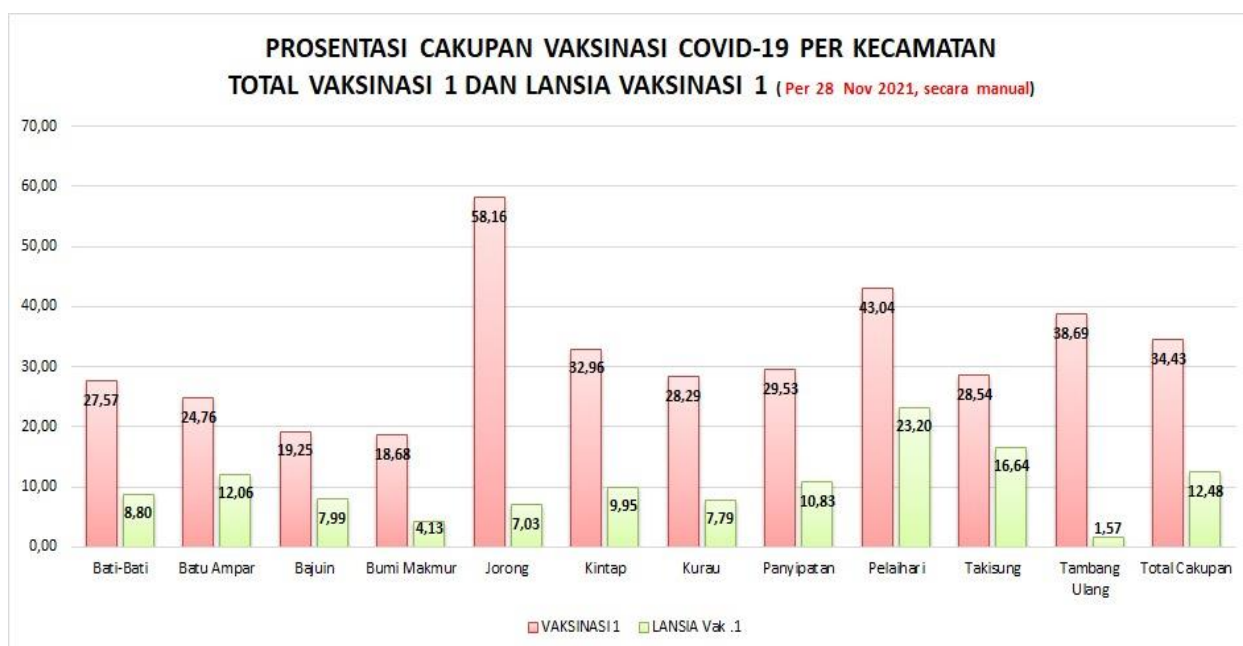
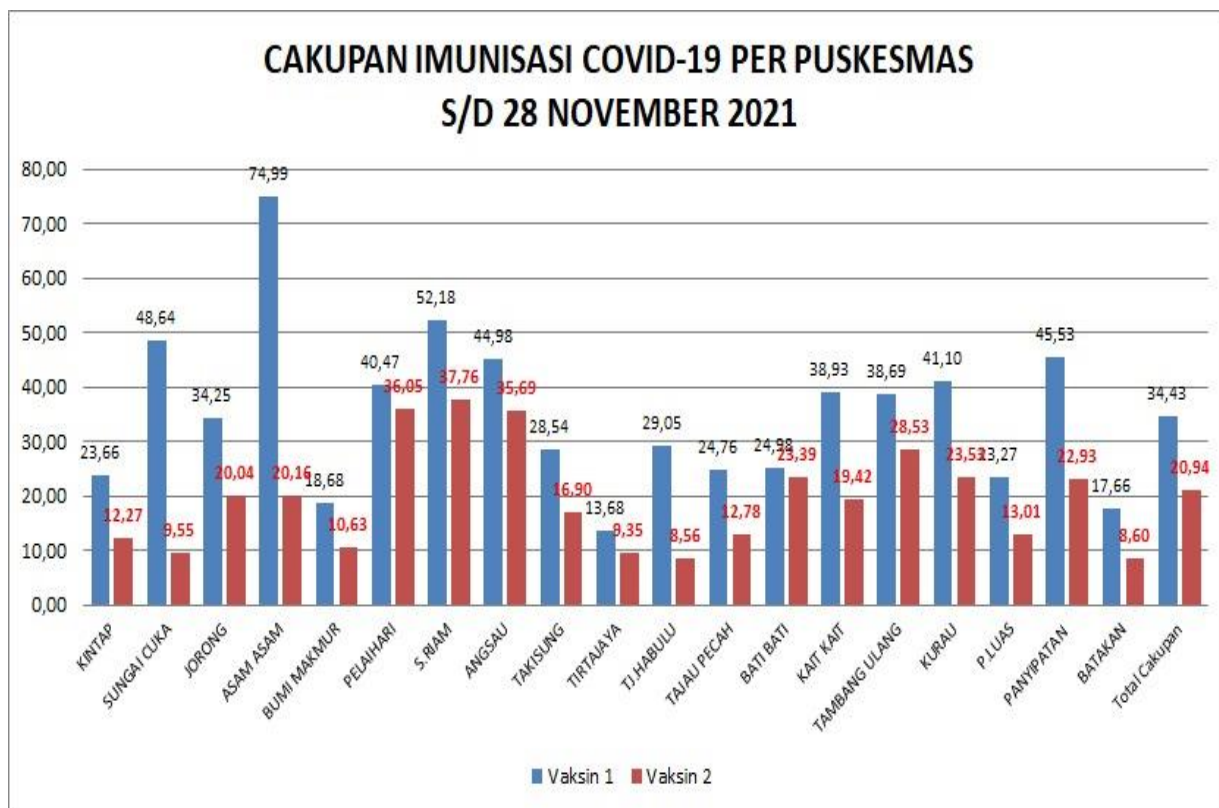
SITUASI SISTEM KEWASPADAAN DINI PENYAKIT POTENSIAL KLB

INDONESIA TAHUN 2021 | Minggu 1 sampai Minggu 47

No	KECAMATAN	JMLH PERINGATAN DINI PENYAKIT DI PUSKESMAS		JUMLAH		KETEPATAN * (%)	KELENGKAPAN * (%)	ALERT YANG DIRESPON *		
		M-47 2021	TOT *	PUSK.	KEC			Jumlah	KLB	
1	BAJUIN		2	2	1	77.66	97.87	2		2
2	BATI - BATI		8	2	1	84.04	94.68	8		8
3	BATU AMPAR		5	1	1	40.43	91.49	5		5
4	BUMI MAKMUR			1	1	91.49	97.87			
5	JORONG		1	2	1	78.72	97.87	1		1
6	KINTAP		7	2	1	71.28	97.87	7		6
7	KURAU		3	2	1	89.36	96.81	3		3
8	PANYIPATAN		3	2	1	85.11	97.87	3		3
9	PELAIHARI		13	4	1	90.78	97.87	1		1
10	TAKISUNG			1	1	72.34	93.62			
11	TAMBANG ULANG			1	1	80.85	97.87			
INDONESIA		0	42	20	11	78.37	96.52	30	0	29
* Data kumulatif Minggu 1 sampai 47										

DATA SASARAN VAKSINASI COVID-19 PER PUSKESMAS KAB. TANAH LAUT

No	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Jumlah Sasaran Vaksinasi	Jumlah Suntikan	SDM Kesehatan	Lansia	Petugas Publik	Masyarakat Umum & Rentan	Remaja
1	KINTAP	26.935	20.713	41.426		1845	2359	15237	2847
2	SUNGAI CUKA	15.965	12.277	24.554		1093	1398	9031	1687
3	JORONG	13.948	10.726	21.452		955	1221	7890	1474
4	ASAM ASAM	19.811	15.235	30.470		1357	1735	11207	2094
5	BUMI MAKMUR	13.793	10.607	21.214		945	1208	7803	1458
6	PELAIHARI	44.636	34.326	68.652		3056	3908	25249	4716
7	S.RIAM	6.812	5.238	10.476		467	597	3853	720
8	ANGSAU	27.020	20.778	41.556		1851	2366	15285	2856
9	TAKISUNG	32.880	25.285	50.570		2252	2879	18600	3475
10	TIRTAJAYA	12.366	9.510	19.020		847	1083	6995	1307
11	TJ.HABULU	7.037	5.411	10.822		482	616	3981	744
12	TAJAU PECAH	27.543	21.181	42.362		1886	2412	15581	2911
13	BATI BATI	36.466	28.042	56.084		2497	3193	20628	3854
14	KAIT KAIT	8.301	6.384	12.768		569	727	4696	877
15	TAMBANG ULANG	18.118	13.933	27.866		1241	1587	10249	1915
16	KURAU	3.946	3.034	6.068		270	346	2232	417
17	P.LUAS	10.072	7.745	15.490		690	882	5698	1064
18	PANYIPATAN	10.824	8.324	16.648		741	948	6123	1144
19	BATAKAN	14.585	11.216	22.432		999	1277	8251	1541
Jumlah		351.058	269.965	545.264	1.778	22.198	28.383	183.352	34.254



KECAHATAN	Jumlah Sasaran Vaksinasi	Jumlah Sasaran Vaksinasi	Lansia				Petugas Publik				Masarakat Umum & Rentan				Remaja				TOTAL VAKSINASI			
	Keseluruhan	LANSIA	V1	%	V2	%	V1	%	V2	%	V1	%	V2	%	V1	%	V2	%	V1	%	V2	%
Beli-Beli	34.426	2.831	249	8,80	124	0,56	1115	3,24	998	2,90	5568	16,17	4443	12,90	2559	7,43	2238	6,59	9401	27,57	7800	22,66
Batu Ampar	21.181	1.742	210	12,00	99	0,45	757	3,57	702	3,31	3897	18,34	1534	7,20	1240	5,85	381	1,80	5344	24,76	2706	12,78
Bajim	14.921	1.227	98	7,99	31	0,34	670	4,49	580	3,89	1484	9,95	547	3,67	631	4,16	194	1,30	2873	19,25	1352	9,06
Bumi Makmur	10.607	872	36	4,13	18	0,08	539	5,08	403	3,80	969	9,14	547	5,16	437	4,12	160	1,51	1981	18,68	1128	10,63
Keneng	25.961	2.115	150	7,03	74	0,33	1411	5,44	1337	5,15	12559	48,38	3350	12,90	979	3,77	460	1,77	15099	58,16	5321	20,11
Kintop	32.990	2.713	270	9,95	72	0,32	1195	3,62	878	2,66	8863	24,44	2409	7,48	1344	4,07	295	0,89	10872	32,96	3714	11,26
Kurusu	10.779	886	69	7,79	54	0,34	546	5,07	503	4,67	1454	13,48	747	6,93	980	9,09	418	3,88	3049	28,29	1722	15,98
Pangajene	19.540	1.606	174	10,83	88	0,40	889	4,55	721	3,69	3964	18,24	1647	8,43	1344	5,85	418	2,14	5771	29,53	2874	14,71
Palaheari	60.342	4.361	1151	23,20	431	1,94	4474	7,41	3995	6,52	16372	27,13	13285	22,02	3973	6,58	4058	6,73	25970	43,04	21769	36,08
Talibung	25.285	2.079	346	16,64	59	0,27	1060	4,19	891	3,52	4350	17,20	2091	7,91	1400	5,77	1321	5,22	7216	28,54	4272	16,90
Tambora Uluang	13.933	1.146	18	1,57	6	0,03	696	5,00	731	5,25	3825	28,17	2657	19,07	752	5,40	581	4,17	5381	38,60	3975	28,53
	369.365	22.138	2771	12,48	1056	0,39	13352	4,95	11739	4,35	61345	22,72	33214	12,30	15489	5,74	10534	3,90	92957	34,43	56533	20,54

Pertemuan Di Aula Barakat Lantai II, Tanggal 27 Mei 2021, PERCEPATAN
PENANGGULANGAN COVID 19





Pertemuan Validasi Data Imunisasi 1 Desember 2021









2) Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) B.8

Tabel. 3.29
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pelayanan Penyakit Menular	Jumlah Penderita Penyakit Menular langsung yang dilayanan sesuai standar	13.816	13.816	100
		Jumlah Penderita Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis yang dilayani sesuai standar	200	70	35
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Desa yang Bebas Penyakit Malaria	120	120	100
		Jumlah Foging Fokus yang dilaksanakan sesuai standar	75	8	10
3	Terlaksananya Pembinaan Kader P2P	Jumlah Kader P2P yang terlatih	10	10	100
4	Terlaksananya Monitoring Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Puskesmas yang aktif melaporkan Kasus Penyakit Menular	19	19	100
Rata-Rata Capaian					74

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	889,203,800	107,332,000	12
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	26,910,000	0	0
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54,072,000	9,019,000	17
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	53,545,000	31,265,000	58
Jumlah				1,023,730,800	147,616,000	14,4

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan juga oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 74 % dengan kategori berhasil.

Kendala : Sampai sekarang masih belum ada penambahan tenaga pengelola program (11 program) untuk memaksimalkan pencapaian target

Saran perbaikan : penambahan tenaga,

Rencana aksi : Pelaksanaan assesment penilaian eliminasi malaria, persiapan data penilaian eliminasi frambusia, TBC, pengusulan keurangan SDM ke Umpeg untuk diteruskan ke BKPSDM.

Hal-hal yang sudah dilakukan : rapat koordinasi lintas sektor dan penandatanganan komitmen dalam rangka eliminasi malaria, monitoring evaluasi (MONEV) program, penyiapan peraturan pendukung terkait kegiatan eliminasi malaria yang akan dilaksanakan, melakukan screening dan sero survei Penemuan Dini penderita HIV, pertemuan DPM/Dokter Praktik Mandiri, screening TBC di ponpes, kegiatan ketuk pintu di desa, investigasi kontak penderita TBC dll

Ketersediaan SDM : Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung 2 (dua) orang yang memegang 11 program (Pengelola program TBC, Diare, Hepatitis, ISPA. Pengelola Program Kusta, Vilariasis, Kusta Prambusia, Rabies. Pengelola HIV, Demam Berdarah Degue) serta Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tenaga yang belum tersedia : pengelola Program Malaria, Lectosperosis, kecacingan dan pengadiminstrasian umum.

Foto-Foto Kegiatan :





3) Eselon IV (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa) B.9

Tabel. 3.30
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Deteksi Dini Faktor resiko Penyakit tidak Menular sesuai SOP	224.677	66.797	30
		Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	26.211	14.362	55
		Jumlah penderita diabetes yang mendapat pelayanan sesuai standar	4.019	3.282	82
2	Terlaksananya Pemberdayaan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Fasilitas umum yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	101	54	53
3	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang menggunakan pelaporan aktif web Posbindo	12	12	100
Rata-Rata Capaian					64

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	450,136,700	77,731,700	17
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	121,098,200	34,463,200	28

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	56,358,200	52,473,200	93
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	31,690,000	7,250,000	23
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	72,867,000	54,344,000	75
Jumlah				732,150,100	226,262,100	30,9

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dilaksanakan juga oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 64 % dengan kategori cukup berhasil.

Kendala : perlu penambahan tenaga pengelola program untuk memaksimalkan pencapaian target

Saran perbaikan : penambahan tenaga

Rencana Aksi : Screening PTM, Bebas Pasung 2021, IVA test pada WUS di 19 Puskesmas di 2021, Peningkatan Kualitas Pelayanan Posbindu, Peningkatan kawasan tanpa rokok di tahun 2021, pengusulan keurangan SDM ke Umpeg untuk diteruskan ke BKPSDM.

Hal-hal yang sudah dilakukan : screening PTM, Pelaksanaan IVA test, Screening/Deteksi Dini Narkoba, Pos

Pelayanan Terpadu (Posbindu) PTM, Peningkatan Pengetahuan tentang KTR ke sekolah-sekolah, Pendataan dan kunjungan rumah ODGJ

Ketersediaan SDM : Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial 1 (satu) orang dan Tenaga PTT (satu) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tenaga yang belum tersedia : Analis Data dan Informasi 1 (satu) orang, Pengelola Penyakit Tidak Menular 1 (satu) orang dan pengadiminstrasian umum 1 (satu) orang.

- a) Persentase Kesehatan pada usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar realisasi 66.797 (29,7%) dengan kendala kegiatan FR PTM tidak berjalan maksimal karena pandemi, maka upaya mengatasi permasalahannya dengan mengaktifkan kembali kegiatan posbindu.
- b) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar realisasi 14.362 (54,8%) dengan kendala kurangnya kepatuhan berobat/control ulang pada penderita hipertensi, maka upaya mengatasi permasalahannya dengan cara penyuluhan serta pelaksanaan kegiatan posbindu.
- c) Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar realisasi 3.825 (95,2%) dengan kendala kegiatan penjangkaran penderita diabetes mellitus yang tidak/kurang maksimal karena adanya pandemic, maka upaya mengatasi permasalahannya dengan cara koordinasi dengan desa dalam penganggaran stik gula darah sebagai bahan screening penderita diabetes mellitus.
- d) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar realisasi 439 (87,8 %) dengan kendala kegiatan penanganan ODGJ berat kurang maksimal karena adanya pandemic, maka upaya

mengatasi permasalahannya dengan cara kunjungan rumah ODGJ.

- e) Jumlah fasilitas umum yang menerapkan kawasan tanpa rokok realisasi 54 (53%) dikarenakan pandemi maka sosialisasi perda KTR tidak berjalan maksimal, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut melaksanakan pemantauan KTR berkoordinasi dengan satpol PP.
- f) Jumlah Puskesmas yang menggunakan pelaporan aktif posbindu Web 12 Puskesmas (100 %), dengan kendala ada beberapa puskesmas yang petugas pengelola program PTM masih baru, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas petugas pengelola PTM dalam pelaporan posbindu Web.

Foto-Foto Kegiatan :









d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 6

Sasaran strategis Nomor 6 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.31

Tabel Sasaran Strategis 6

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2020			2021			2023
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	37%	0%	0%	47%	77%	163%	68%
	2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	19%	100%	525%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	25%	0%	0%	30%	0%	0%	50%
	5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	44%	52%	117%	48%	100%	208%	56%
	6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	97,60%	98%	100%	98,37%	99%	100%
Rata-Rata Capaian				140%				112%

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan **112 % dengan sangat berhasil**. Adapun sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan 6 Indikator sasaran yang harus dicapai antara lain:

1. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama ditahun 2021 dimana jumlah fasilitas kesehatan yang sudah terakreditasi utama sebanyak 7 Fasilitas dari taget sebanyak 9 Puskesmas sehingga persentase realisasi sebesar 77% dari target 47% dan capaian 163%. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yakni realisasi sebesar 0 % dari target 37% dan capaian sebesar 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk ketercapaian ditahun 2021 telah tercapai berdasarkan target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 68%. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi ini adalah dalam hal penilaian atau survei akreditasinya, dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga kegiatan survei akreditasi dilakukan penundaan atau tidak dapat dilaksanakan di tahun 2021, sesuai dengan surat edaran Menteri kesehatan RI nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang penundaan kegiatan akreditasi. Untuk itu sebagai tindak lanjut diusulkan kembali Penilaian akreditasi puskesmas di tahun 2022 dan 2023 agar pelayanan meningkat sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2 orang pengelola Rujukin Kesehatan, 1 orang Analis Kesehatan dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.
2. Persentase pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC) dimana jumlah kasus kegawatdaruratan yang

ada ditahun 2021 sebanyak 503 kasus dan seluruhnya dapat ditangani dengan persentase realisasi sebesar 100% dari target 100% dan capaian sebesar 100%. Hal ini merupakan capaian yang baik dikarenakan pada akhir tahun 2020 PSC sudah melaksanakan kegiatan pada Sekretariat PSC yang berlokasi di Jalan Hutan Kota Pelaihari. Selanjutnya di akhir tahun 2021 menempati gedung baru pada ex Rsud H. Boejasin. Untuk ketercapaian jangka menengah sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Walaupun ketercapaian kinerja indikator tersebut telah mencapai 100% namun masih ada beberapa kendala yaitu terkait bangunan/gedung yang belum definitif Untuk itu diharapkan ditahun selanjutnya dapat diusulkan kembali untuk penambahan anggaran untuk pembangunan gedung PSC. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2 orang pengelola Rujukan Kesehatan, 1 orang Analis Kesehatan dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.

3. Persentase fasilitas kesehatan yang berstatus BLUD di tahun 2021 dimana jumlah Puskesmas yang ada sebanyak 19 Puskesmas dan seluruhnya berstatus BLUD dengan persentase realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi puskesmas dengan PPK BLUD telah mencapai target realisasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian jangka menengah sampai dengan tahun 2023 telah tercapai dengan target 100%. Ketercapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh tim terkait dan efisiensi serta efektifitas anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Walaupun ada beberapa program anggaran yang di refocusing kegiatan masih dapat terlaksana dengan baik. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya

indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2 orang pengelola Rujukan Kesehatan, 1 orang Analis Kesehatan dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.

4. Persentase Desa dengan IKS katagori sehat dari jumlah desa sebanyak 135 desa sampai dengan sekarang masih belum ada desa yang berada dalam katagori sehat, sehingga di tahun 2021 realisasi masih 0% dari target 30% sehingga capaiannya pun 0%. Hal ini tidak berbeda dengan tahun 2020 yang mana realisasi juga masih 0% dari target 25% dan capaiannya pun juga 0%. Dan dapat disimpulkan bahwa capaian jangka menengah tahun 2023 masih belum tercapai yaitu sebesar 50%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut ialah adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, Kebiasaan pola hidup masyarakat yang sulit dirubah. Untuk itu perlu adanya inoovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan kerja sama lintas sektor untuk ketercapaian kegiatan. Untuk anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut di tahun 2021 dilakukan refocusing dan dialihkan untuk kegiatan penanganan covid 19. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, 1 orang pengelola pelayanan kesehatan dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.
5. Persentase jumlah kelompok asuhan mandiri tanaman obat keluarga (Asman TOGA) di Desa dimana jumlah Kelompok ASMAN TOGA yang ada 65 dari target 65 desa. Sehingga ditahun 2021 pesrsentase realisasinya sebesar 100%. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 52% dari target 44% dan capaian kinerja sebesar 117%. Pada tahun 2021 realisasi mengalami peningkatan yakni sebesar 100% dari target sebesar 48% dan capaian kinerja sebesar 208%. Hal ini telah

melebihi target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 56%. Ketercapaian ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak khususnya masyarakat yang mengerti akan manfaat tanaman. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, 1 orang pengelola pelayanan kesehatan dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.

6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN yaitu sebanyak 342.555 penduduk dari jumlah seluruh penduduk sebanyak 348.226 penduduk sehingga persentase realisasi sebesar 98,37%. Pada tahun 2021 sebesar 98,37% dari target yang ada sebesar 100%. Hal ini telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun keberhasilan dari indikator tersebut adalah program pemerintah daerah untuk pemberlakuan UHC sehingga target 100% ditahun 2023 dapat tercapai. Adapun sumber daya manusia yang mendukung terlaksanya indikator tersebut ada 1 orang Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, 1 orang pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, 1 Orang Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan dan 1 orang PTT tenaga Administrasi.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 6 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ini dilaksanakan oleh Kepala Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021.

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional) B.10

Tabel. 3.32
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Keluarga yang didata dalam pendataan keluarga sehat	18.486	18.486	100
		2. Jumlah keluarga yang bermasalah kesehatan mendapat imtervensi pelayanan kesehatan	9243	9243	100
2.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Lokasi Bencana	Jumlah Lokasi yang mendapat pelayanan kesehatan tanggap bencana sesuai SOP	12	12	100
3.	Terlaksananya pembinaan kesehatan tradisional	Jumlah kelompok asuhan mandiri taman obat keluarga (ASMAN TOGA) di desa	65	65	100
4.	Monitorig dan Evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pencatatan dan pelaporan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	15	0	0
Rata-Rata Capaian					80%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	28,050,000	23,090,000	82
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	55,755,000	46,620,000	84
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	700,542,260	418,076,250	60
Jumlah				784.347.260	487,786,250	62

Dalam rangka mendukung strategis Nomor 6 dilaksanakan juga oleh Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai pada Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 80 % dengan kategori berhasil.

Kendala : pandemi COVID-19 tidak dapat maksimal karena pembatasan pengumpulan massa, sedangkan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional lebih banyak berkaitan dengan masyarakat

Saran perbaikan : melakukan inovasi kegiatan agar tetap berjalan di masa pandemi COVID-19.

Rencana Aksi : melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana dan melakukan usulan kekurangan SDM

Hal-hal yang sudah dilakukan: mengusul kekurangan SDM ke Umpeg, PIS-PK sudah mulai masuk kegiatan Intervensi, menyurati UPT Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan yang kemaren tertunda.

Ketersediaan SDM : sangat kurang, hanya terdapat tenaga pengelola pelayanan kesehatan 1 (satu) orang. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) diperlukan tenaga analis data dan informasi 1 (satu) orang dan tenaga Pengadministrasi & Penyajian dan Publikasi.

Foto-Foto Kegiatan :











2) Eselon IV (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan)

B.11

Tabel. 3. 33
Capaian Kinerja Kepala Seksi Kesehatan Rujukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi Utama	9	7	77 %
2	Terlaksananya Pelayanan Kegawat Daruratan	Jumlah kasus kegawat daruratan yang ditangani sesuai SOP	300	503	168%
3	Terlaksananya fasilitas BLUD	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan berstatus BLUD	21	21	100 %
4	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai izin operasional	21	21	100%
Rata-Rata Capaian					111%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6,939,351,790	4,770,500,600	69
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1,665,971,580	640,620,352	38

		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,929,000	607,500	2
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	162,090,000	109,710,000	68
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,638,000	0	0
Jumlah				8,812,980,370	5,521,438,452	63

Dalam rangka mendukung strategis Nomor 6 dilaksanakan juga oleh Kepala Seksi Kesehatan Rujukan sesuai kegiatan dalam perjanjian kinerja pada tabel diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 111 % dengan kategori sangat berhasil.

Kendala : terdapat refocusing anggaran di 2021 difokuskan untuk kegiatan penanganan Pandemi COVID-19, kemudian terkait PSC terkendala pada Bangunan/gedung, bangunan yang ada tidak memenuhi standar pelayanan PSC, Sarana dan prasarana pendukung kegiatan PSC masih kurang.

Saran perbaikan : melaksanakan seluruh kegiatan yang diperbolehkan selama pandemi covid-19 contoh pendampingan pasca akreditasi, pendampingan pasca

akreditasi dan workshop terkait akreditasi, untuk PSC dukungan anggaran dan lahan untuk pembangunan PSC

Rencana Aksi : Melaksanakan Pendampingan dan workshop utk 11 Puskesmas yang akan melaksan, re-akreditasi, Kaji Banding ke Bandung ke PSC 119

Hal-Hal yang sudah dilakukan : Workshop terkait terkait akreditasi, Mutu dan PPI, Kaji Banding ke sinjai terkait home care home visit

Ketersediaan SDM : Pengelola Dokumen Perizinan 1 (satu) orang, Pengelola Rujukan Kesehatan 1 (satu) orang, Analis Penilaian dan Akreditasi 1 (satu) orang dan tenaga PTT 1 (satu) orang, berdasarkan ABK masih dibutuhkan 1 (satu) orang tenaga pengadministrasian umum 1 (satu) orang, meskipun pada prinsipnya untuk seksi dan PSC mencukupi secara kuantitas, tapi masih perlu peningkatan secara kualitas seperti peningkatan kompetensi melalui diklat-diklat

Pelaksanaan Layanan On Call PSC 119. Bermula dengan adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 Pemda Tanah Laut memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membentuk Layanan Publik (PSC 119), Serta adanya Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, akhirnya Terbentuklah **Layanan Public Safety Center 119**. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional **12 November 2019** yang dilaksanakan di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang diresmikan Langsung Bapak Bupati Sukamta, Dewan DPRD Tanah Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Layanan On Call atau Layanan Public Safety Center. Layanan on Call merupakan salah satu program unggulan Bupati tanah Laut yang beralamat pada jalan hutan kota (komplek perkantoran Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut).

Kemudian pada akhir tahun 2021 Layanan On Call PSC 119

berpindah tempat ke Gedung Ex RSUD H. Boejasin Pelayhari tepatnya pada awal November 2021

Adapun kegiatan Layanan On Call PSC 119 pada tahun 2021 tercantum pada table di bawah ini :

Data Layanan On Call dari Januari sampai dengan Desember 2021

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Emergency	503
2	Non Emergency	2004
3	Kegiatan	44
4	Panggilan telepon	503

Foto-Foto Data Dukung dan Kegiatan Layanan On Call 119





3) Eselon IV (Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) B.12

Tabel. 3.34
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pelayanan Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah Jiwa yang menjadi Peserta JKN	348.226	342.555	98,37%
		Jumlah Rumah Sakit yang bekerjasama dalam jaminan Kesehatan Daerah	2	2	100%
2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pelayanan Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang aktif dalam pencatatan dan pelaporan pada aplikasi P-Care	19	19	100%
Rata-Rata Capaian					99,5

N o	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	58,292,287,200	57,194,860,618	98
Jumlah				58,292,287,200	57,194,860,618	98

Dalam rangka mendukung strategis Nomor 6 dilaksanakan juga oleh Kepala Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sesuai kegiatan dalam perjanjian kinerja pada tabel diatas.

Tabel diatas menjelaskan rata-rata pencapaian kegiatan 99,8 % dengan kategori sangat berhasil.

Jumlah kepesertaan : Jumlah Penduduk 348.226 Jiwa di Tahun 2021, Jumlah Jiwa yang menjadi Peserta JKN target 348.226 Jiwa, realisasi 342.555 Jiwa (100 %), UHC di Kabupaten Tanah Laut sudah tercapai tercapai meski belum 100 %.

Kendala: validasi data kependudukan antara DUKCAPIL, DINKES, DINSOS dan BPJS Kesehatan Kab. Tanah Laut tidak rutin.

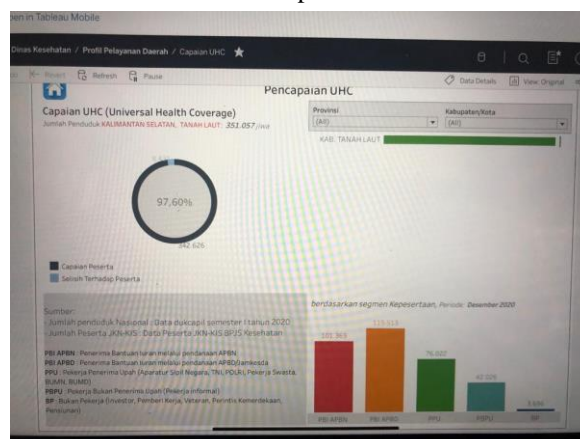
Saran Perbaikan : perlu dilaksanakannya validasi kependudukan maksimal setiap 3 (tiga) bulan.

Rencana Aksi : membuat TS pembayaran premi untuk mencover s.d 12 bulan.

Ketersediaan SDM : Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1 (satu) orang, Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan 1 (satu) orang dan PTT 1 (satu) orang berdasarkan ABK masih dibutuhkan Tenaga Pengadministrasian Umum 1 (satu) orang.

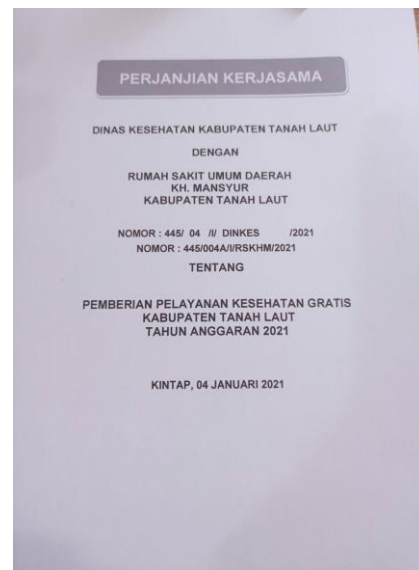
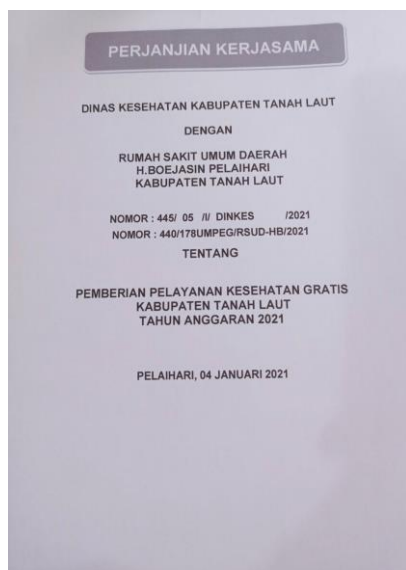
Foto-Foto Data Dukung

Dashboard Capaian JKN 2021

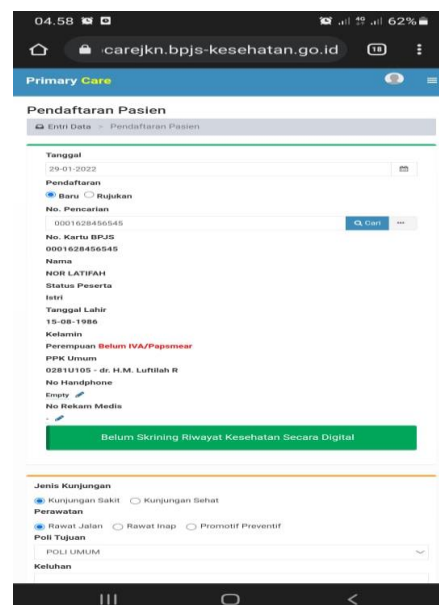
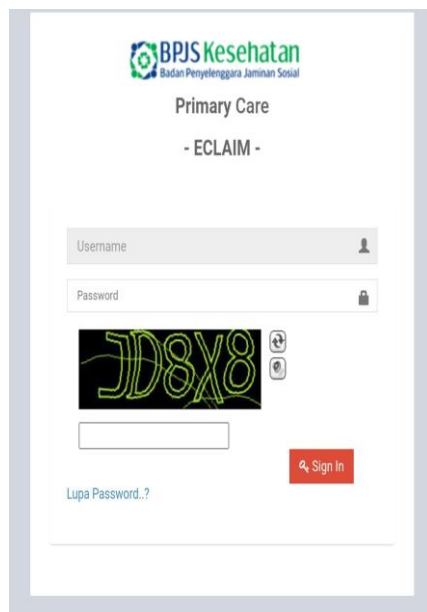


MONITORING CAPAIAN UHC											
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021											
s.d. 31 Desember 2021											
No	Kantor Kabupaten/Kota	Monitor Cakupan Kepesertaan									
		Jumlah Penduduk	PBI APBN	PD PEMDA	PPU	PBP	BP	TERDAFTAR		BELUM TERDAFTAR	
5	Tanah Laut	348,226	99,495	122,480	75,237	41,460	3,883	342,555	98.37%	5,671	1.6%

2 Rumah Sakit yang Kerja Sama



Penggunaan Aplikasi P-Care pada 19 Puskesmas



B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Tabel. 3.35

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan

No	Uraian	Anggaran/Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132
2	Belanja Operasi	364.439.411.024,00	302.168.342.285,38	82,91
3	Belanja Modal	82.579.421.023,00	71.207.650.976,83	86,23
TOTAL BELANJA		447.018.832.047	373.375.993.262,21	83,53

Dari tabel dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebesar Rp 373.375.993.262,21 dengan capaian sebesar 83,53% dari Anggaran Rp. 447.018.832.047. Realisasi belanja Operasional sebesar Rp 302.168.342.285,38 dari anggaran sebesar Rp 364.439.411.024,00 dengan capaian 82,91% dan untuk realisasi belanja modal Rp 71.207.650.976,83 dari anggaran

sebesar Rp 82.579.421.023,00 dengan capaian 86,23%. Sedangkan untuk realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 83.699.259.604,00 terealisasi 110.497.711.103,96 dengan capaian sebesar 132%.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan, mengingat di tahun 2021 bangsa kita tengah dilanda pandemi covid-19 yang secara tidak langsung sebagian anggaran di Kabupaten Tanah Laut khususnya di bidang kesehatan harus mengalami pergeseran, refocusing, rasionalisasi dan perubahan untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 323.773.730.734,00 setelah perubahan adalah sebesar Rp 447.018.832.047,- dengan realisasi pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp 373.372.963.262,-.

Rata-rata capaian kinerja sasaran rencana strategis dinas kesehatan : 80,1% (kriteria berhasil)

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya, fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan yang dapat

menunjang kelancaran tugas pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan sasaran dan program yang terdiri dari 8 sasaran dan 5 Program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.36
Ringkasan Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Sasaran dan Program Dilaksanakan Pada Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	2021		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	215,812,315,427	183,487,168,741	85
2. Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178,655,350,953	147,571,677,642	83
3. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan				
4. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48,935,270,983	39,081,121,820	80
5. Meningkatnya Pencegahan				

dan Pengendalian Penyakit	4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	90,414,500	26,332,500	29
6. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan				
7. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,525,480,184	3,206,662,559	91
8. Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran				
JUMLAH		447,018,832,047	373,372,963,262	83,53

3. Realisasi Persentase Keuangan Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis

Tabel. 3.37

Realisasi Persentase Keuangan Kinerja dan Efisiensi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Keuangan	% Fisik	% Efisiensi
1.	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	43,4	105	61,6

2.	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	86,7	95	8,3
3.	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	37,8	86,3	48,6
4.	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	5,5	100	94,5
5.	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	33,5	84	50,4
6.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	74,3	112	37,7
7.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	78,8	94,5	15,7
8.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	66,3	100	33,7

4. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Tabel 3.38

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan 2021

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan rapat rapat, konsultasi, dan koordinasi
b. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
c. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia

a.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
c.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
d.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
a.	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
4.	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
a.	Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
b.	Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
c.	Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
d.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Krisis Kesehatan dan SPGDT PCS 199
e.	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
5.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
a.	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
b.	Penyusunan laporan keuangan
c.	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
6.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a.	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK REGULER)
b.	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (Penurunan Stunting DAK Penugasan)
c.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan
7.	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan
a.	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
b.	Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
d. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
e. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (DID)
8. Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
b. Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
d. Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DID)
9. Program Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok
a. Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan)
a. Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
c. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
d. Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan
e. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik)
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
b. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)
12. Program Bantuan Operasional Kesehatan
a. Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)

b.	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
13. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
a.	Pembinaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
b.	Distribusi Obat dan e Logistik (DAK Non Fisik)
14. Program Informasi Kesehatan Medik	
a.	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik
b.	Pengadaan Cetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
15. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata	
a.	Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah sakit
16. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata	
a.	Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit (DAK)
17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
a.	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
18. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
a.	Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan

Note : 18 PROGRAM 46 KEGIATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
d.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.	Penyediaan Bahan/Material
h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pengadaan Mebel
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pemeliharaan Mebel
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
g.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.	Peningkatan Pelayanan BLUD

a.	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
b.	Pengembangan Puskesmas
c.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
f.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
g.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
h.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
i.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
j.	Pengadaan Obat, Vaksin
k.	Pengadaan Bahan Habis Pakai
l.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
m.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
n.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
g.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
h.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
l.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
m.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
n.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
o.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
p.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
q.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
r.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
s.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan

	Tradisional Lainnya
t.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
u.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
v.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
w.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
X.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
y.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
z.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
aa.	Operasional Pelayanan Puskesmas
ab.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
ac.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
ad.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
ae.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
b.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
c.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
a.	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
c.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
a.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2.	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan

	Rumah Tangga
a.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
a.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
a.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
5.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
a.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
6.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
a.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Note : 5 PROGRAM 24 KEGIATAN 98 SUB KEGIATAN

Dari tabel diatas dapat terlihat perubahan jumlah program dan kegiatan dari tahun 2020 dan 2021 dimana pada tahun 2021 ada

penambahan Sub kegiatan. Sesuai dengan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 (pemutakhiran) , Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel.3.39
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

	2020	2021
Program	18	5
Kegiatan	46	24
Sub Kegiatan	-	98

Berikut kami tampilkan juga Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan 2021 :

Tabel.3.40
Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja skpd
Tahun 2020 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN DAERAH	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132,02	78.359.909.828,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132,02	78.359.909.828,35
Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.019.600,00	93,65	1.729.696.150,00
Lain-lain PAD yang Sah	83.589.259.604,00	110.394.691.503,96	132,07	76.630.213.678,35
BELANJA DAERAH	447.018.832.047,00	373.375.993.262,21	83,53	271.740.352.687,00
BELANJA OPERASI	364.439.411.024,00	302.168.342.285,38	82,91	231.688.410.839,00
Belanja Pegawai	104.753.845.021,00	86.593.891.908,00	82,66	81.440.314.588,00
Belanja Barang dan Jasa	258.703.816.003,00	214.665.385.945,38	82,98	150.248.096.251,00
Belanja Hibah	981.750.000,00	909.064.432,00	92,60	0,00
BELANJA MODAL	82.579.421.023,00	71.207.650.976,83	86,23	40.051.941.848,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	2.086.258.450,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.279.221.705,00	42.914.800.685,00	80,55	29.225.007.310,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.030.499.318,00	27.066.494.791,83	96,56	8.346.018.088,00
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	1.090.000.000,00	1.079.140.000,00	99,00	394.658.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.700.000,00	147.215.500,00	81,92	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(363.319.572.443,00)	(262.878.282.158,25)	72,35	(193.380.442.858,65)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(363.319.572.443,00)	(262.878.282.158,25)	72,35	(193.380.442.858,65)

Realisasi pendapatan asli daerah Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp. 110.497.711.103,96 melebihi dari target pendapatan yaitu sebesar 83.699.259.604,- dengan capaian sebesar 132% sedangkan di tahun 2020 sebesar realisasi Pendapatan sebesar Rp. 78.356.909.828,35 sehingga terjadi penurunan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan system BLUD.

5. Rekap Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Sumber APBD dan APBN Tahun 2021

Tabel. 3. 41

Realisasi Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2021

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	APBD	18.515.041.308	15.371.751.049	83	DAU
	SISA BTT TA 2020	22.546.893.331	16.547.947.803	73	SISA BTT
2	APBN	15.030.604.214	7.798.968.771	52	(DID + BOK + BOKT)
TOTAL		56.092.538.853	39.718.667.623	71	

Dari tabel dapat dilihat capaian realisasi Anggaran Covid-19 tahun 2021 adalah sebesar 71 % dengan kategori berhasil. Penggunaan Anggaran Covid-19 tahun 2021 digunakan untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Fasilitas Pelayanan Khusus, Belanja Operasional untuk penanganan dan vaksinasi Covid-19, Belanja Obat-Obatan dan BMHP untuk penanganan Covid-19, Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19, Insentif Vaksinasi dan Tracer dan lain-lain yang berkaitan dengan Penanganan Covid-19. Adapun sumber dana yang diperoleh yaitu dari APBD dan APBN. Untuk APBD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Dana Biaya

Tak Terduka (BTT) Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk APBN berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Biaya Operasional Kesehatan (BOK) serta sisa Biaya Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) Tahun 2020.

C. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dilakukan per triwulan sesuai data terlampir. Selama tahun 2021 pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan setiap triwulan karena terkendala pandemi covid-19. Namun untuk pengumpulan data capaian tetap dilaksanakan setiap triwulan.

Dari data Monitoring Capaian kinerja yang dilakukan per triwulan memang ada beberapa indikator kegiatan yang tidak berjalan dengan semestinya karena ada beberapa kendala. Hampir semua kegiatan terkendala dengan adanya pandemi covid-19 dan dari segi pendanaan terkendala oleh adanya refocusing atau pemangkasan anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu dari segi Sumber Daya Manusia beberapa bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memang masih kurang.

Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan diharapkan semua pihak yang terkait dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat melakukan berbagai langkah demi peningkatan Capaian Kinerja.

Adapun hasil kegiatan yang diperoleh dari Monitoring dan evaluasi capaian Kinerja yaitu;

1. Mendorong semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
2. Menyampaikan kendala yang dihadapi
3. Mencari solusi untuk menangani kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan dinas kesehatan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dinas kesehatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran hasil kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2021, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria sangat berhasil yaitu Penurunan Angka Kematian Bayi, Penurunan Prevalensi Gizi Stunting dan Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan 2 (dua) sasaran tidak berhasil yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Indeks Keluarga Sehat, secara keseluruhan rata-rata capaian sebesar 63,2% atau bisa dikatakan secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Cukup Berhasil, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 (rata-rata capaian 75,2 %). Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan oleh Perdarahan 3 (tiga) orang, Hypertensi dalam kehamilan 3 (tiga) orang, Infeksi 1 (satu) orang, Gangguan darah 1 (satu) orang dan sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja

terhadap 8 Sasaran Strategis dan 29 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 11 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2021 ada 7 indikator yang realisasinya mengalami penurunan dari target sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19.

Hasil analisis 8 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 rata-rata terkategori 84 % dengan kategori berhasil, mengalami penurunan dari tahun 2019 kategori sangat berhasil (88,9%), serta masih terdapat beberapa indikator sasaran dengan kategori sangat berhasil dicapai, cukup berhasil dicapai dan tidak berhasil dicapai.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dari Anggaran Rp. 256.477.237.923,- terealisasi sebesar Rp. 195.455.442.323,- (76%), dan fisik 77 %. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD) tahun 2021 dari Anggaran Rp. 90.398.445.579,- terealisasi sebesar Rp. 76.242.644.588,- (84,34%). Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp.71.387.915.073,- terealisasi 76.016.667.657,35 (106,48%).

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut dimulai pada bulan Maret awal terjadinya pandemi covid-19 berjalan kurang optimal dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut menghancurkan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, fokus kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah di tahun 2021 adalah penanganan pandemi covid-19, karenanya masih banyak hal-hal yang harus dibenahi antara lain yaitu masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang

masih jauh di bawah standar, menurunnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta kegiatan lainnya yang mengalami penurunan atau belum mencapai target. Untuk itu perlu kerja keras dan dukungan seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan untuk lebih bisa berinovasi meningkatkan pelayanan kesehatannya di era pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, termasuk penggerakan/pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

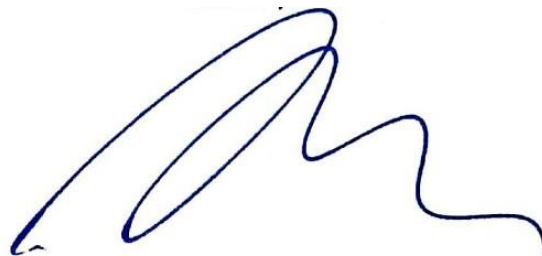
B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil capaian kinerja yang ada, maka strategi untuk peningkatan capaian kinerja kedepan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama bidang kesehatan.
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal.
3. Peningkatan promosi kesehatan dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan kesehatan, mengaktifkan Desa Siaga terutama menggairahkan kembali Posyandu sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang efektif menggerakkan program kesehatan di desa.
4. Diperlukan keberadaan dan aktivitas konkrit pelaku pembangunan kesehatan untuk lebih menggalakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan. Hal ini diperlukan sinergisme, kemitraan serta koordinasi di antara pelaku pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi di daerah yang meliputi Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
5. Diperlukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk memberikan dan meningkatkan standar pelayanan

kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a wavy line.

Hj. Nina Sandra, SKM.MM

NIP. 19640710 198511 2 002